

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA**

***EVALUATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN
WASTE MANAGEMENT IN NORTH MOROWALI REGENCY***

HERRY YOHANES PINONTOAN

Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
Program Studi Magister Administrasi Publik



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2025**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA**

***EVALUATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN
WASTE MANAGEMENT IN NORTH MOROWALI REGENCY***

**HERRY YOHANES PINONTOAN
B 10224061**

**TESIS
Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
Pada Program Studi Administrasi Publik Program Magister**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2025**

PENGESAHAN

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

EVALUATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN WASTE MANAGEMENT IN NORTH MOROWALI REGENCY

Oleh

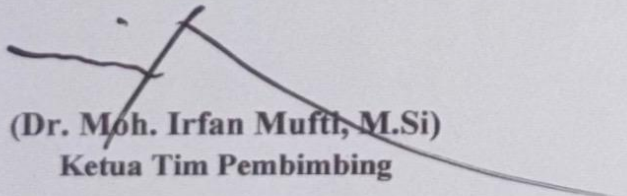
HERRY YOHANES PINONTOAN
B10224061

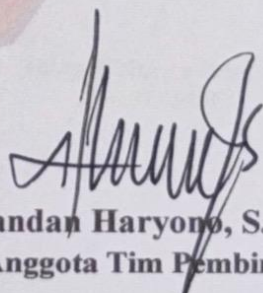
TESIS

Disusun sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik


Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini,

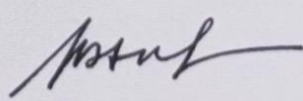
Palu, Desember 2025


(Dr. Moh. Irfan Mufti, M.Si)
Ketua Tim Pembimbing


(Dr. Dandan Haryono, S.Sos., M.Si)
Anggota Tim Pembimbing

Mengetahui,


(Dr. Muh. Nawawi, M.Si.)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako


(Prof. Dr. Mustainah M, M.Si)
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor), baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palu, Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Herry Yohanes Pinontoan
B102244061

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Adapun judul tesis ini adalah “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Morowali Utara”.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, arahan, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada istri tercinta Heidy Vivi Pusung Amd.Sek, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan dukungan di saat diri ini mulai kehilangan semangat dan fokus untuk penyelesaian studi.
2. Kepada anak-anak tercinta, Clara Christacia Pinontoan, Clarissa Christania Pinontoan, dan Mahaprana Yudha Pinontoan, yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kepada Orang Tua tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk menjadi orang yang lebih baik
4. Kepada keluarga besar penulis, kemudian Ummu Salsabila, Yongki Leonard Pilongo atas bantuannya dalam urusan administrasi dan banyak hal lainnya, serta kepada teman-teman seperjuangan Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako Kelas C semester I dan Kelas B Semester II, termasuk sahabat terbaik Yuliani, atas kebersamaan, dukungan, baik moril dan materiil.
5. Kepada Dr.dr.Delis Julkarson Hehi, MARS Bupati Morowali Utara yang senantiasa memberikan kesempatan dan ruang bagi penulis untuk berkembang ke arah yang lebih baik.
6. Prof. Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.

7. Dr. Samsurizal M. Suleman, M.Si, selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Prof. Dr. Ir. Sri Anjar Lasmini, M.P., selaku Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
9. Dr. Muh. Nawawi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako sekaligus juga sebagai penguji.
10. Dr. Muh. Irfan Mufti, M.Si, selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan arahan, bimbingan, serta koreksi konstruktif dalam proses penyusunan tesis ini.
11. Dr. Dandan Haryono, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga untuk memberikan masukan berharga dalam penyempurnaan tesis ini.
12. Prof. Dr. Mustainah M., M.Si, Dr. Nuraisyah, S.Sos., M.Si, selaku tim penguji yang telah memberikan saran, kritik, serta masukan ilmiah yang memperkaya pemahaman penulis terhadap substansi penelitian ini.
13. Seluruh dosen dan staf di Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako, atas ilmu dan pelayanan akademik yang telah diberikan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, maupun secara praktis dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di daerah.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan oleh Herry Yohanes Pinontoan dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Morowali Utara”, di bawah bimbingan Mohammad Irfan Mufti (Pembimbing I) dan Dandan Haryono (Pembimbing II).

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Morowali Utara. Hal ini ditunjukkan oleh keterbatasan sarana prasarana, cakupan pelayanan yang hanya tersedia pada dua kecamatan, rendahnya kapasitas operasional, serta ketimpangan akses layanan antarwilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut menggunakan indikator evaluasi kebijakan publik agar dapat memberikan gambaran tingkat efektivitas kebijakan serta rekomendasi perbaikan ke depan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Model evaluasi yang digunakan merujuk pada enam dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Informan penelitian terdiri dari pejabat pemerintah, petugas lapangan, DPRD, dan masyarakat pengguna layanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara belum berjalan optimal. Secara parsial, terdapat kemajuan pada wilayah layanan seperti peningkatan ritase armada, pengurangan titik penumpukan sampah, dan peningkatan responsivitas petugas. Namun pada skala kabupaten, implementasi masih belum efektif karena keterbatasan armada aktif (hanya empat unit), minimnya TPS, rendahnya pemerataan layanan, serta belum adanya kebijakan operasional berbeda untuk wilayah pedesaan dan perkotaan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, penambahan fasilitas pendukung, model kebijakan berbasis karakteristik wilayah, serta peningkatan kolaborasi masyarakat dan swasta.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah, William N. Dunn, Pemerintah Daerah, Morowali Utara.

ABSTRACT

This research was conducted by Herry Yohanes Pinontoan, entitled "Evaluation of Regional Government Policy on Waste Management in North Morowali Regency," under the guidance of Mohammad Irfan Mufti (Supervisor I) and Dandan Haryono, (Supervisor II).

The main problem in this research focuses on the suboptimal implementation of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Waste Management in North Morowali Regency. This is indicated by limited infrastructure, service coverage only available in two sub-districts, low operational capacity, and disparities in access to services between regions. The purpose of this study is to evaluate the implementation of this policy using public policy evaluation indicators to provide an overview of the policy's effectiveness and recommendations for future improvements.

This research uses qualitative methods with a descriptive approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation analysis. The evaluation model used refers to William N. Dunn's six dimensions of policy evaluation: efficiency, effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research informants consisted of government officials, field officers, the Regional People's Representative Council (DPRD), and community service users.

The results indicate that the implementation of waste management policies in North Morowali Regency has not been optimal. Partially, there has been progress in service areas, such as increased fleet trips, reduced waste accumulation points, and increased officer responsiveness. However, at the regency level, implementation remains ineffective due to limited active fleets (only four units), a lack of waste disposal sites (TPS), poor service equity, and the lack of distinct operational policies for rural and urban areas. These findings underscore the need for institutional strengthening, additional supporting facilities, a policy model based on regional characteristics, and increased collaboration between the public and the private sector.

Keywords: Public Policy Evaluation, Waste Management, William N. Dunn, Regional Government, North Morowali..

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Ucapan Terima Kasih... ..	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoretis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ALUR PEMIKIRAN.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Pustaka.....	16
2.2.1 Paradigma Administrasi.....	17
2.2.2 Teori Evaluasi Kebijakan.....	19
2.2.3 Teori Implementasi.....	27
2.2.4 Pendekatan Komunikasi Kebijakan	36
2.2.5 Teori Jaringan Kebijakan (Policy Network)	37
2.2.6 Pendekatan Budaya Kebijakan.....	38
2.3 Alur Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Definisi Konsep	41
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5 Instrumen Penelitian.....	45
3.6 Penentuan Informan	46
3.7 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.8 Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Morowali Utara	54
4.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi	55
4.1.3 Gambaran Permasalahan Persampahan.....	57
4.1.4 Kebijakan Daerah tentang Persampahan	61
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103

5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran.....	105
Referensi.....	108
Lampiran	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Model Sederhana Proses Implementasi Strategi.....	28
-----------------	--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Kebijakan.....	14
Tabel 4.1	Data Timbulan Sampah Per Hari, Bulan, dan Tahun.....	59
Tabel 4.2	Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis	61
Tabel 4.3	Alur Pengelolaan Sampah	65
Tabel 4.4	Triangulasi Sumber Berdasarkan Temuan Penelitian	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan publik karena memiliki keterkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan kenyamanan ruang publik. Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan estetika wilayah, serta risiko penyebaran penyakit. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan kebijakan dalam pelaksanaan layanan persampahan. Regulasi ini disusun untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai prinsip kesehatan lingkungan, serta mengatur peran pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung terciptanya kebersihan lingkungan. Meskipun telah memiliki landasan hukum, pelaksanaan kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kelembagaan, sarana prasarana, maupun tingkat partisipasi masyarakat.

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai melaksanakan berbagai bentuk layanan

persampahan, seperti penyapuan jalan utama, pengumpulan sampah dari wilayah perkotaan, serta pengangkutan menuju tempat penampungan sementara. Kegiatan ini merupakan tahapan awal bagi daerah dalam membangun sistem layanan kebersihan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan.

Upaya penyediaan sarana pendukung juga telah dilakukan pemerintah melalui penempatan tong sampah portable pada area publik seperti pasar, kawasan perkantoran, fasilitas umum, dan pusat keramaian. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta mengurangi potensi pembuangan sampah sembarangan. Penempatan sarana tersebut juga menjadi salah satu strategi edukasi lingkungan yang bersifat preventif dan partisipatif.

Dalam pelaksanaan operasional pengangkutan, pemerintah memanfaatkan empat unit kendaraan pengangkut sampah yang masih aktif beroperasi dengan jadwal ritase yang telah ditentukan. Armada ini berfokus melayani wilayah Kecamatan Petasia dan Lembo sebagai area pelayanan utama. Pengaturan jadwal dan rute pengangkutan dilakukan untuk memastikan bahwa layanan tetap berjalan meskipun kapasitas armada masih terbatas dan belum mampu mencakup seluruh wilayah kabupaten.

Pemeliharaan armada menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan layanan. Pemerintah daerah telah melakukan perbaikan terhadap beberapa kendaraan operasional yang mengalami kerusakan sehingga dapat kembali digunakan dalam mendukung kegiatan pengangkutan sampah. Hal ini

menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan efektivitas pelayanan, meskipun sumber daya yang tersedia masih terbatas.

Pengelolaan operasional juga didukung dengan penyusunan jadwal, pembagian tugas petugas lapangan, serta mekanisme pelaporan kondisi lapangan melalui saluran komunikasi informal seperti WhatsApp. Respons pemerintah terhadap aduan masyarakat menunjukkan adanya upaya membangun interaksi pelayanan yang lebih cepat dan responsif. Namun demikian, sistem pengawasan dan manajemen operasional masih memerlukan penguatan agar lebih konsisten dan terukur.

Meskipun sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan jangkauan layanan karena saat ini hanya dua kecamatan yang memperoleh layanan pengangkutan sampah, sedangkan delapan kecamatan lainnya belum terlayani secara optimal oleh pemerintah daerah.

Di wilayah yang belum mendapatkan layanan, masyarakat umumnya mengelola sampah secara mandiri melalui pembakaran, pembiaran di ruang terbuka, atau pembuangan ke lahan yang tidak sesuai peruntukan. Praktik ini berpotensi menimbulkan risiko gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan ekosistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek edukasi dan pembinaan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Keterbatasan sarana pendukung juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah. Hingga saat ini hanya terdapat satu unit

Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berfungsi, sehingga alur pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir belum berjalan secara optimal. Minimnya fasilitas pemrosesan lanjutan juga berdampak pada tingginya volume sampah yang tidak terolah.

Jumlah personel petugas kebersihan yang terbatas juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Rasio petugas terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah masih belum ideal, sehingga terdapat beberapa area yang tidak dapat dibersihkan secara rutin. Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya tumpukan sampah di beberapa titik tertentu.

Selain aspek sumber daya, tingkat kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Belum banyak masyarakat yang menerapkan pemilahan sampah dari sumber maupun menggunakan fasilitas persampahan sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait perilaku hidup bersih dan pengelolaan sampah belum berjalan efektif dan belum menghasilkan perubahan perilaku secara signifikan.

Model pengelolaan sampah yang berjalan juga masih menggunakan pendekatan konvensional, yaitu kumpul–angkut–buang, tanpa adanya sistem pengolahan berbasis konsep berkelanjutan seperti 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Belum tersedia fasilitas TPS 3R maupun bank sampah sebagai bagian dari sistem pengurangan timbulan sampah dari sumber. Kondisi ini menunjukkan terbatasnya inovasi pengelolaan sampah yang diarahkan pada pemanfaatan kembali bahan yang masih bernilai ekonomis.

Secara keseluruhan, terdapat kesenjangan antara regulasi dengan

implementasi yang berlangsung di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah masih memerlukan pembenahan menyeluruh agar dapat mencapai standar pelayanan minimum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan regulasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara menjadi sangat penting. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan sampah agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan.

Evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dalam proses kebijakan publik karena berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu menjawab permasalahan publik yang menjadi dasar perumusannya. Dunn (2003:608) menyatakan bahwa *“policy evaluation refers to the process of determining the worth, merit, and value of a policy, based on evidence about its performance and its ability to solve public problems.”* Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada keluaran kebijakan, tetapi juga menilai kebermanfaatan, relevansi, dan tingkat keberhasilan implementasinya di masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara, urgensi evaluasi semakin jelas ketika masih ditemui kesenjangan antara tujuan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Sampah, dengan kondisi nyata seperti terbatasnya sarana prasarana, jangkauan layanan yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah ada, implementasinya belum sepenuhnya berjalan sesuai arah kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat memberikan gambaran objektif mengenai capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan ke depan sehingga kebijakan tidak hanya hadir sebagai regulasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen solusi bagi peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan publik di Kabupaten Morowali Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup Khususnya pengelolaan sampah di terapkan di Kabupaten Morowali Utara

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah daerah kabupaten Morowali Utara dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian evaluasi kebijakan publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dengan

menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (1994), penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai implementasi dan efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam memperbaiki dan menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung perumusan kebijakan yang adaptif dan responsive terhadap kondisi lokal serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ALUR PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun kerangka pemikiran untuk penelitian ini, penting untuk memahami konteks hasil-hasil studi sebelumnya terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai wilayah. Berikut ini adalah lima studi terdahulu yang menjadi referensi, disertai dengan pendekatan analisis kualitatif atas temuan mereka:

1. Tri Lestari & Utomo (2025) – *Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (TPS Pasar Simpang Baru Panam)*

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Lestari dan Utomo pada tahun 2025 berfokus pada evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di salah satu TPS Kota Pekanbaru, yakni TPS Pasar Simpang Baru Panam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, serta telaah dokumen terkait. Model evaluasi yang digunakan mengacu pada enam indikator menurut Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki regulasi serta program pengelolaan sampah, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah dari sumber, minimnya kegiatan sosialisasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Faktor-faktor tersebut

berdampak pada efektivitas dan efisiensi kebijakan yang belum optimal dalam menjawab permasalahan di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program Bank Sampah. Kondisi tersebut menegaskan perlunya strategi baru dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk intensifikasi sosialisasi, peningkatan kapasitas infrastruktur, maupun penguatan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Pekanbaru sudah memiliki landasan hukum, tetapi dalam implementasinya masih membutuhkan perbaikan dari segi manajerial dan partisipasi publik.

2. Hardiyanti et al. (2024) – *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang, Kabupaten Demak*)

Penelitian yang dilakukan Hardiyanti dan tim menitikberatkan pada pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kalikondang, Kabupaten Demak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah mampu mengatasi persoalan lingkungan yang muncul akibat aktivitas pembuangan sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di TPA Kalikondang masih sangat sederhana, yakni dengan metode *open dumping* yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan

modern. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, kebijakan ini dianggap belum mampu memberikan hasil yang memadai, karena keterbatasan infrastruktur, tidak adanya fasilitas pencacahan sampah, serta minimnya teknologi pengolahan seperti komposting. Keluhan masyarakat mengenai bau menyengat dan air lindi juga belum direspons dengan baik oleh pemerintah daerah.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan gas metan dari sampah belum dilakukan secara optimal, sehingga potensi ekonomi dari pengelolaan sampah masih terabaikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak masih memerlukan intervensi serius, baik dari sisi regulasi, penyediaan anggaran, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Evaluasi ini menegaskan pentingnya transformasi dari pola pembuangan tradisional ke arah sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.

3. Salsabila et al. (2024) – *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tangerang Selatan*)

Salsabila dan rekan-rekannya mempelajari pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan. Wawancara mendalam dan observasi lapangan dipadukan dengan metodologi kualitatif dalam penelitian ini. Enam indikator penilaian kebijakan dalam model evaluasi William N. Dunn dikutip dalam kerangka analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik

regulasi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan dapat mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi sampah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Tangerang Selatan cukup berhasil dalam hal kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, permasalahan masih terjadi dalam hal efektivitas dan efisiensi, karena keterbatasan anggaran, sarana pendukung, dan kapasitas kelembagaan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang sudah dirancang belum sepenuhnya mampu mengurangi beban TPA maupun meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah di Tangerang Selatan telah menunjukkan beberapa capaian positif, diperlukan strategi lanjutan agar implementasinya lebih efektif. Peran masyarakat melalui edukasi lingkungan serta peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta sangat diperlukan. Evaluasi ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh keterlibatan aktif berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

4. Azizah et al. (2024) – *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Talumelito, Gorontalo*

Penelitian yang dilakukan Azizah dan tim meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Talumelito, Gorontalo. Pendekatan

yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator evaluasi yang digunakan merujuk pada teori Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini berupaya mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah daerah berhasil dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Talumelito masih menghadapi berbagai kendala serius. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, pengelolaan belum optimal karena banyak fasilitas yang rusak, alat berat tidak terawat, serta keterbatasan tenaga kerja dan anggaran. Dari aspek kecukupan dan pemerataan, pengelolaan sampah dianggap belum memadai karena manajemen tidak berjalan sesuai rencana, sehingga manfaatnya bagi masyarakat juga belum maksimal.

Meskipun demikian, penelitian ini mencatat bahwa pemerintah daerah cukup responsif terhadap keluhan masyarakat sekitar TPA. Namun, partisipasi masyarakat masih rendah dan hasil kebijakan belum menunjukkan keberlanjutan. Kajian ini menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur, peningkatan anggaran, serta strategi pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Gorontalo.

5. Cahya Murni & Silam (2024) – *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya*

Cahya Murni dan Silam melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama kajian ini adalah menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, khususnya dalam mendorong penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan limbah melalui penerapan prinsip 3R. Hal ini terlihat dari adanya inisiatif masyarakat dalam melakukan daur ulang dan pengurangan sampah di sumber. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana pengangkutan, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya telah berjalan sesuai regulasi, masih terdapat banyak hambatan yang perlu diatasi. Kelemahan manajerial serta keterbatasan fasilitas menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

Aspek Gap	Fitriani (2022) – Pekanbaru	Rahmawati (2021) – Demak	Santoso (2020) – Tangsel	Yusuf (2019) – Gorontalo	Lestari (2021) – Palangka Raya	Herry Pinontoan – Morowali Utara
Judul Penelitian	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPS Pekanbaru	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kabupaten Demak	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Cipeucang Tangsel	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gorontalo	Evaluasi Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Palangka Raya	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Morowali Utara
Rumusan Masalah / Fokus	Efektivitas pengelolaan sampah di TPS, partisipasi masyarakat	Efektivitas TPA Demak dan kendala operasional	Dampak lingkungan dan efektivitas TPA Cipeucang	Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Gorontalo	Efektivitas implementasi perda kota	Evaluasi implementasi Perda, edukasi, peran industri, sarana TPST/TPS 3R, peluang kerjasama PLN
Tujuan Penelitian	Mengetahui efektivitas TPS Pekanbaru	Mengkaji efektivitas TPA Demak	Menilai efektivitas TPA Cipeucang	Mengevaluasi implementasi TPA Gorontalo	Mengevaluasi implementasi Perda 2015	Mengevaluasi kebijakan daerah secara komprehensif dengan pendekatan multi-dimensi
Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif (teori Dunn)	Kualitatif deskriptif	Kualitatif deskriptif	Kualitatif deskriptif	Kualitatif deskriptif	Kualitatif deskriptif berbasis teori Dunn, dengan fokus tambahan pada edukasi, inovasi, dan kerjasama

Aspek Gap	Fitriani (2022) – Pekanbaru	Rahmawati (2021) – Demak	Santoso (2020) – Tangsel	Yusuf (2019) – Gorontalo	Lestari (2021) – Palangka Raya	Herry Pinontoan – Morowali Utara
						lintas sektor
Lokasi Penelitian	Kota Pekanbaru	Kabupaten Demak	Kota Tangerang Selatan	Kota Gorontalo	Kota Palangka Raya	Kabupaten Morowali Utara (fokus Petasia, Lembo, TPA regional)
Hasil Penelitian	Masih rendahnya partisipasi masyarakat, fasilitas terbatas	Kendala teknis TPA, pengelolaan belum optimal	Masalah pencemaran dan keterbatasan pengelolaan	Implementasi lemah, partisipasi masyarakat rendah	Perda belum berjalan optimal	Diharapkan menemukan kelemahan implementasi perda, kurang edukasi publik, sarana TPST/TPS 3R minim, potensi waste-to-energy belum dimanfaatkan

Kelima penelitian di atas memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah proses yang sangat kontekstual. Beberapa benang merah dapat ditarik sebagai pelajaran penting.

Dari kelima studi yang dikaji, terdapat beberapa pola atau benang merah yang secara konsisten muncul dalam dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah, yakni:

1. Makna dan Interpretasi Lokal Menentukan Efektivitas Implementasi

Semua penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa. Kebijakan dipahami, ditafsirkan, dan dijalankan berdasarkan konteks lokal, baik itu norma sosial, budaya, nilai

spiritual, maupun pengalaman kolektif masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat sebagai Faktor Kunci Keterlibatan masyarakat secara aktif—bukan sekadar sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai aktor dalam proses pelaksanaan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pengelolaan sampah. Semakin besar ruang partisipatif, semakin tinggi peluang keberhasilan implementasi.
3. Komunikasi dan Koordinasi antar Aktor Ketidakefektifan, miskomunikasi, dan tumpang tindih koordinasi antara pembuat kebijakan, pelaksana teknis, dan masyarakat menjadi kendala besar. Komunikasi kebijakan yang tidak efektif akan menimbulkan multi-tafsir, bahkan resistensi.
4. Ketergantungan pada Kepemimpinan atau Komitmen Politis Keberhasilan beberapa daerah (seperti Surabaya dan Bandung) sangat dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan lokal. Namun, hal ini sekaligus menjadi kelemahan karena keberhasilan tersebut tidak selalu berkelanjutan setelah kepemimpinan berganti.
5. Sumber Daya dan Kapasitas Kelembagaan Masih Lemah Hampir semua studi menyoroti bahwa faktor sumber daya manusia, anggaran, serta kapasitas kelembagaan (terutama di tingkat desa/kelurahan) belum optimal, yang berdampak langsung pada ketidaksinambungan dan lemahnya implementasi kebijakan.

2.2 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka disusun untuk menjelaskan

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara secara komprehensif, dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya bukan sekadar menilai sejauh mana kebijakan diterapkan secara administratif, melainkan untuk memahami secara mendalam proses sosial, politik, budaya, dan komunikasi yang membentuk implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Pendekatan ini menggunakan beberapa teori utama dan pendukung sebagai pisau analisis, yaitu:

2.2.1 Paradigma Administrasi

Administrasi publik telah mengalami evolusi signifikan melalui berbagai paradigma yang mencerminkan perubahan dalam teori dan praktik pengelolaan sektor publik. Empat paradigma utama yang sering dibahas adalah Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), dan New Public Governance (NPG). Setiap paradigma ini menawarkan pendekatan dan fokus yang berbeda dalam administrasi publik.

1. Old Public Administration (OPA)

Paradigma OPA, yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, menekankan pentingnya kepatuhan yang ketat terhadap peraturan formal dan organisasi birokrasi yang hierarkis. Karya perintis Max Weber dalam teori administrasi klasik menjadi landasan bagi strategi ini, yang menekankan efisiensi melalui pembagian kerja yang jelas dan pemisahan antara politik dan administrasi. Tujuan

utama OPA adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena cenderung kaku dan kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

2. New Public Management (NPM)

Kelemahan OPA mendorong pengembangan NPM pada akhir 1980-an. Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mutu layanan publik, paradigma ini memperkenalkan teknik-teknik manajemen dari sektor swasta ke sektor publik. NPM menekankan persaingan, desentralisasi, evaluasi kinerja, dan metodologi yang berorientasi pada hasil. Strategi ini mendorong adaptasi, kreativitas, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, para penentang NPM menunjukkan bahwa penekanan yang berlebihan pada pasar dapat mengorbankan tanggung jawab sosial dan cita-cita kewarganegaraan. Lebih lanjut, layanan publik mengutamakan kepentingan publik, yang tidak selalu konsisten dengan cara penerapan mekanisme pasar di sektor publik.

3. New Public Service (NPS)

NPS menanggapi NPM dengan menekankan bahwa kebutuhan rakyat adalah yang utama, bukan hanya kemampuan pemerintah untuk mengelola atau membimbing mereka. Paradigma ini menekankan tanggung jawab publik, partisipasi warga negara, dan nilai-nilai

demokrasi. Dengan berperan sebagai fasilitator, administrasi publik memungkinkan masyarakat umum untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan penekanan pada layanan yang tepat waktu dan bertanggung jawab, NPS menyoroti nilai kerja sama warga negara dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama.

2.2.2 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan, dampak, serta efektivitas suatu kebijakan publik. Evaluasi ini sangat penting karena dapat memberikan informasi objektif yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan, serta sebagai bahan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dalam studi administrasi publik dan kebijakan publik, berbagai teori telah dikembangkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Teori-teori ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan instrumen evaluasi. Beberapa teori evaluasi kebijakan yang umum digunakan meliputi teori dari William N. Dunn, model evaluasi CIPP dari Daniel Stufflebeam, teori Sabatier dan Mazmanian, pendekatan Logical Framework (LFA), serta Utilization-Focused Evaluation dari Michael Quinn Patton.

Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dan merupakan salah satu model evaluasi kebijakan yang berorientasi

pada pengambilan keputusan. Model ini sering digunakan dalam evaluasi program-program publik, termasuk kebijakan pemerintah. CIPP terdiri dari empat komponen evaluasi:

1. Context Evaluation: Bertujuan untuk memahami konteks atau latar belakang permasalahan yang menjadi dasar perlunya suatu kebijakan. Ini termasuk identifikasi kebutuhan dan analisis lingkungan sosial atau ekonomi.
2. Input Evaluation: Menilai perencanaan dan strategi kebijakan, termasuk sumber daya yang tersedia dan pendekatan yang digunakan.
3. Process Evaluation: Menganalisis pelaksanaan kebijakan secara operasional. Apakah program dijalankan sesuai dengan rencana? Apa hambatan yang muncul?
4. Product Evaluation: Menilai hasil akhir dari kebijakan. Ini mencakup output dan outcome yang dihasilkan serta dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

Keunggulan model ini adalah sifatnya yang fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai konteks evaluasi, baik dalam skala kecil maupun besar.

Teori Sabatier dan Mazmanian. Teori ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan evaluasi kebijakan. Sabatier dan Mazmanian (1980) menyatakan bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan sangat tergantung pada beberapa variabel kunci, antara lain:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan: Semakin jelas dan konkret tujuan suatu kebijakan, maka semakin mudah kebijakan tersebut dievaluasi.
2. Teori kausal yang valid: Hubungan sebab-akibat yang mendasari kebijakan harus didasarkan pada teori atau data yang valid.
3. Komitmen dan kapasitas pelaksana: Lembaga atau aktor pelaksana harus memiliki kapasitas teknis, sumber daya, serta komitmen yang tinggi.
4. Dukungan dari pihak luar: Dukungan politik, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan stakeholder menjadi faktor penentu lainnya.

Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks implementasi dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Logical Framework Approach (LFA). Pendekatan ini berasal dari dunia manajemen proyek tetapi banyak diadaptasi dalam evaluasi kebijakan publik. LFA merupakan metode evaluasi berbasis logika yang sistematis. Pendekatan ini menggunakan matriks logika yang menghubungkan antara:

1. Tujuan umum (Goal)

2. Tujuan khusus (Purpose)

3. Output

4. Input dan aktivitas

Setiap komponen dilengkapi dengan indikator keberhasilan, sumber data, dan asumsi penting. Dengan LFA, evaluator dapat melacak apakah input dan aktivitas benar-benar menghasilkan output yang mendukung pencapaian tujuan. LFA sangat efektif dalam kebijakan atau program dengan struktur yang jelas dan logis.

Utilization-Focused Evaluation – Michael Quinn Patton. Pendekatan ini dikembangkan oleh Michael Quinn Patton dan menekankan bahwa evaluasi harus berfokus pada kegunaan nyata bagi pengguna kebijakan. Evaluasi dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna utama (utilization-focused), bukan sekadar sebagai dokumen formal. Ciri khas pendekatan ini meliputi:

1. Keterlibatan aktif pengguna kebijakan dalam proses evaluasi
2. Penekanan pada konteks penggunaan hasil evaluasi
3. Fleksibilitas dalam metode yang digunakan sesuai kebutuhan pengguna

Pendekatan ini sangat berguna dalam konteks kebijakan publik karena mendorong hasil evaluasi yang dapat langsung diimplementasikan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn (2003) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai proses menghasilkan informasi yang digunakan untuk menilai kinerja kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur berbagai aspek keberhasilan kebijakan berdasarkan indikator tertentu.

Menurut Dunn, evaluasi kebijakan memiliki beberapa dimensi utama yang digunakan sebagai alat analisis dalam menilai efektivitas suatu kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika kebijakan yang diterapkan berhasil mengurangi atau menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan awal, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan bagaimana sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun anggaran, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang mampu memberikan hasil maksimal dengan biaya atau sumber daya seminimal mungkin.

3. Kecukupan

Kecukupan merujuk pada sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat memberikan solusi yang cukup terhadap permasalahan yang dihadapi. Artinya, kebijakan tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga harus mampu mengatasi persoalan dalam skala yang signifikan.

4. Pemerataan

Aspek pemerataan menilai apakah kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh kelompok sasaran. Kebijakan yang baik harus mampu menghindari ketimpangan atau diskriminasi dalam pelaksanaannya sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sama.

5. Responsivitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan kebijakan dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan. Kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi publik dengan cepat serta dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

6. Ketepatan

Ketepatan menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Suatu kebijakan dikatakan tepat apabila langkah-langkah yang diambil

sesuai dengan akar permasalahan yang ada, serta berbasis pada data dan kajian yang kuat.

Thomas R. Dye (2002) dalam karyanya *Understanding Public Policy* mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai suatu proses untuk mengetahui “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa dilakukan, dan apa dampaknya bagi masyarakat.” Menurut Dye, evaluasi kebijakan tidak hanya sekadar menilai hasil akhir, tetapi juga berfungsi untuk memahami bagaimana proses politik, interaksi antaraktor, serta faktor-faktor sosial yang membentuk kebijakan tersebut. Dengan demikian, evaluasi dipandang sebagai instrumen penting untuk menghubungkan antara desain kebijakan dengan kenyataan implementasi di lapangan.

Wayne Parsons (1995) menekankan bahwa evaluasi kebijakan memiliki dua dimensi, yaitu evaluasi prospektif (ex-ante) dan evaluasi retrospektif (ex-post). Evaluasi prospektif dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan, dengan tujuan memprediksi efektivitas dan risiko dari alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi retrospektif dilakukan setelah kebijakan berjalan, untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Model Parsons ini menekankan pentingnya evaluasi tidak hanya sebagai penilaian di akhir, tetapi juga sebagai proses pembelajaran (*policy learning*) yang berkelanjutan

Menurut Situmorang dalam (Amanda, 2016), evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui penyebab kegagalan suatu kebijakan dan apakah kebijakan tersebut memengaruhi tujuan yang diinginkan atau sebaliknya. Dalam (Ratnawulan & Rusdiana, 2015), Lessinger memberikan penjelasan tentang Proses akademis untuk menghasilkan, memperoleh, atau memvisualisasikan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan disebut evaluasi. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan yang menyaring informasi untuk mengusulkan alternatif jawaban atas suatu masalah, menurut Purwanto (2002), sebagaimana dijelaskan dalam Taufiqurakhman (2014).

Pandangan ini memperjelas bahwa evaluasi merupakan komponen penting dan fundamental dari kebijakan publik. Winarno (2016) mengutip Laster dan Stewart yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilihat sebagai pembeda antara dua tugas yang berbeda yaitu:

1. Tugas pertama melibatkan penggambaran hasil potensial dari penerapan suatu kebijakan dengan mengukur dampaknya;
2. Melibatkan evaluasi keberhasilan atau kegagalan formulasi kebijakan (margin of error) berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya..

Evaluasi merupakan komponen kunci dalam proses pembuatan kebijakan dan krusial bagi pembentukan maupun penerapan

kebijakan. Oleh karena itu, keseimbangan informasi dalam proses perencanaan kebijakan—yang kemudian dikembangkan dan dinilai untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan—sangat menentukan kualitas kebijakan publik.

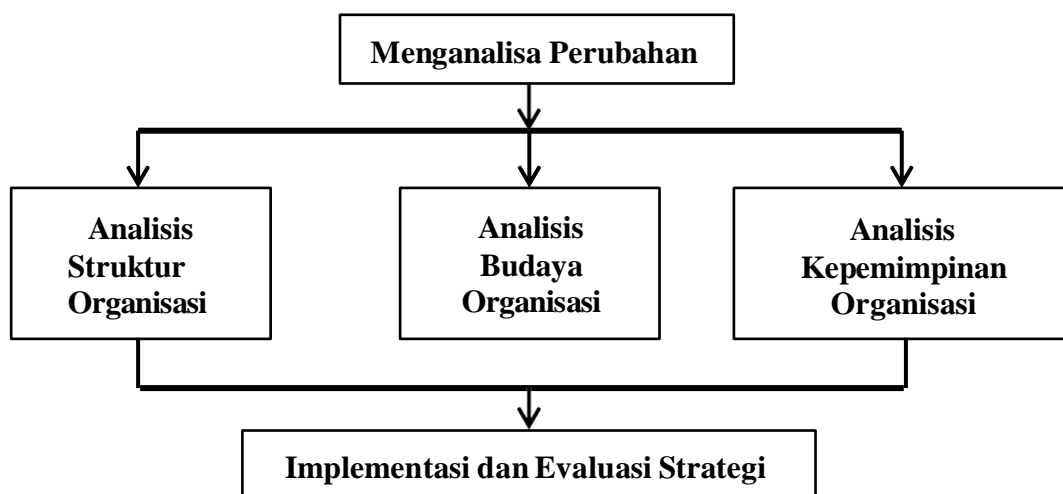
Ketujuh teori evaluasi kebijakan di atas memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan publik. Pemilihan teori evaluasi yang digunakan sangat tergantung pada jenis kebijakan yang dianalisis, tujuan evaluasi, serta ketersediaan data. Penggunaan teori evaluasi secara tepat akan membantu dalam menyusun rekomendasi yang kuat bagi para pembuat kebijakan.

2.2.3 Teori Implementasi

Menurut Grindle dalam Wibawa (1994: 10)¹³, implementasi adalah suatu proses tindakan administratif yang luas yang dapat dikaji pada tingkat suatu program tertentu. Menurut Van Meter dan Horn dalam Wibawa (1994: 15), implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sektor publik dan swasta, baik secara terpisah maupun kolektif, dengan tujuan mencapai tujuan. "Proses implementasi baru akan dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar Grindle dalam Wibawa (1994: 3).

Hal ini mendukung gagasan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn dalam Wibawa (1994: 11) bahwa tujuan implementasi adalah menciptakan jaringan yang memungkinkan lembaga pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan publik.

Hal ini berbeda dengan pendapat Certo dan Peter dalam Setiawan dan Zulkieflimansyah (2007: 103)¹⁴, yang menyatakan bahwa agar suatu strategi dapat berhasil dijalankan, tindakan-tindakan utama yang perlu diselesaikan dalam prosesnya adalah seperti yang terlihat pada Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 1 Model Sederhana Proses Implementasi Strategi

Berikut ini adalah deskripsi tentang bagaimana setiap program, anggaran, dan metode diimplementasikan dalam suatu organisasi.

a. Program

Program adalah daftar tindakan atau prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana sekali pakai. Program mencakup

memulai proyek penelitian baru, mereorganisasi organisasi, atau mengubah budaya internalnya. Pengembangan program dapat dimulai setelah alternatif strategis yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai telah ditemukan, menurut Bryson dalam Crown (2004:133). Sebuah program harus menjadi prosedur yang inventif dan kreatif yang memanfaatkan peluang atau substitusi yang telah diketahui. Dari semua sumber daya yang tersedia, program harus memanfaatkannya sebaik mungkin.

Sementara itu, "program adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih instansi pemerintah atau bekerja sama dengan masyarakat, untuk mencapai tujuan tertentu," menurut Akuntabilitas Instansi Pemerintah dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan BPKP (2007:34,17). Program dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya saling terkait erat. Kebijakan instansi terkait erat dengan keberhasilan program. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat diimplementasikan, kebijakan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu. Tindakan berikut harus diambil untuk menjamin bahwa suatu program dilaksanakan dengan cara yang realistis :

- 1) Program ini dikembangkan dengan fokus pada prioritas utama dan memengaruhi pencapaian visi, tujuan, sasaran, dan target lembaga pemerintah..

- 2) Evaluasi sejauh mana program dan visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan saling terkait. Hubungan yang menciptakan keseimbangan di antara program-program yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh para pemimpin..
- 3) Koordinasi program. Hal ini tidak perlu menyeluruh; melainkan harus memadai untuk program-program kerja yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontrol yang terlalu ketat dan mengurangi antusiasme serta independensi karyawan.
- 4) Pengembangan program harus sangat mudah.
- 5) Setiap pimpinan unit berkontribusi dengan mengusulkan program untuk unit mereka masing-masing.
- 6) Kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan bahwa program kerja relevan dengan kondisi saat ini dan masa depan, alih-alih hanya mengekstrapolasi kondisi dari masa lalu.

"Kebijakan publik tidak relevan tanpa tindakan nyata yang dilaksanakan melalui program, kegiatan, atau proyek," menurut Grindle dalam Sistaningrum (2010:167)¹⁸. Dengan demikian, ia berkata, "Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang berorientasi pada pelaksanaan program." Program adalah rencana lengkap yang menguraikan sumber daya yang akan digunakan dan terintegrasi menjadi satu kesatuan, menurut Terry dalam Sistaningrum (2010:167). Program tersebut menguraikan tujuan, pedoman,

protokol, teknik, standar, dan rencana keuangan.

Lebih lanjut, isi program harus menguraikan "kepentingan yang terdampak, jenis manfaat, tingkat perubahan yang diharapkan, status pengambil keputusan (lokasi pengambilan keputusan), pelaksana program, dan sumber daya yang dialokasikan," menurut Grindle dalam Sistaningrum (2010:168). Jelas dari uraian sebelumnya bahwa suatu program terdiri dari: pelaksana/staf program, struktur organisasi (komposisi orang), dan kekuatan sumber daya (infrastruktur).

b. Anggaran

Program yang dinyatakan dalam satuan moneter disebut anggaran.

Biaya setiap program dipecah agar manajemen dapat merencanakan dan mengendalikan biaya. Anggaran menetapkan laporan keuangan kinerja yang menunjukkan pengaruh yang diantisipasi terhadap kondisi keuangan organisasi, selain menyediakan persiapan menyeluruh untuk strategi baru yang sedang dijalankan. Anggaran adalah rencana komprehensif yang disusun secara metodis, dinyatakan secara formal dalam metrik kognitif, dan biasanya dinyatakan dalam satuan moneter untuk menunjukkan perolehan dan pemanfaatan sumber daya organisasi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), menurut Supriyono dalam Setiawan dkk. (2007:105)¹⁹. Program-program diterjemahkan sesuai dengan tugas setiap pemimpin di setiap tingkatan saat menyusun anggaran..

Ditambahkan pula bahwa oleh Supriyono dalam Setiawan dkk (2007:107)²⁰ fungsi anggaran adalah :

1) Fungsi perencanaan

Perencanaan sangat penting bagi kegiatan organisasi jangka pendek atau pusat pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawaban harus dilakukan secara bersamaan agar dapat mencapai tujuan dan berfungsi sebagai alat perencanaan untuk melaksanakan kegiatan dan inisiatif organisasi.

2) Fungsi Koordinasi

Suatu organisasi harus mengatur rencana dan kegiatan dari berbagai pusat pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, berbagai pusat pertanggungjawaban dikoordinasikan oleh anggaran untuk memastikan bahwa mereka bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.

3) Fungsi Komunikasi

Agar suatu organisasi efektif, saluran komunikasi harus dibangun di antara unit-unitnya. Tujuan, rencana, kebijakan, implementasi, dan bahkan setiap penyimpangan yang dihasilkan, semuanya tercakup dalam anggaran ini. Dalam hal ini, berbagai tingkat dan unit organisasi berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses anggaran selama pembuatan dan pendistribusiannya. Mereka kemudian bertanggung jawab atas anggaran tersebut melalui pelaporan berkala.

4) Fungsi Motivasi

Para pemimpin didorong untuk mencapai tujuan dari area pertanggungjawaban yang mereka awasi oleh anggaran. Para pelaksana berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, yang dapat digunakan untuk memantau kinerja mereka serta mendorong mereka untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan guna mencapai tujuan.

5) Fungsi Pengendalian dan Evaluasi

Rencana dan implementasi dapat dibandingkan menggunakan anggaran untuk mengidentifikasi perbedaan.

6) Peran Pendidikan

Dalam hal ini, para pemimpin menggunakan anggaran sebagai alat untuk bekerja sama secara erat dengan SKPD lain di dalam perusahaan dan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mereka awasi. Anggaran adalah rencana kerja atau rencana aksi/implementasi untuk suatu unit organisasi yang menciptakan atau menggunakan sumber daya, menurut Simon, yang dikutip dalam Widodo (2000:17, 21). Dengan demikian, berikut adalah tujuan dari proses penganggaran :

- 1) Mengubah strategi organisasi menjadi aktivitas yang menghasilkan nilai.
- 2) Menilai apakah terdapat cukup sumber daya untuk melaksanakan

aktivitas yang telah diotorisasi sebelumnya.

- 3) Meletakkan dasar untuk meningkatkan efisiensi dengan mengevaluasi indikator implementasi strategi yang penting, seperti apakah tujuan selaras dengan metrik masukan, proses, dan keluaran yang memfasilitasi eksekusi yang efektif..

- Prosedur

Sebagai hasil dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, paradigma tata kelola telah menyebabkan perubahan dalam interaksi publik-pemerintah. Pendekatan yang lebih seragam terhadap manajemen pemerintahan juga tersirat melalui penggunaan standar tata kelola perusahaan, yang mewajibkan lembaga pemerintah untuk mengikuti berbagai kriteria standar dalam menjalankan operasinya. Dari sudut pandang konseptual, prosedur adalah serangkaian langkah logis yang berpuncak pada hasil yang diinginkan. Alur kerja, aliran data, dan aktivitas adalah contoh bagaimana pengguna sistem proses kerja menyusun proses yang diinginkan ini. Dari segi fungsionalitas, prosedur membantu menciptakan sistem kerja dan alur kerja yang sistematis, akuntabel, dan teratur; menjelaskan bagaimana tujuan kerja dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang relevan; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; mengatur tata tertib administrasi dan pelaksanaan kerja sehari-hari sesuai dengan metode yang telah ditetapkan;

menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis; dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antar unit kerja. Dengan demikian, suatu metode umumnya menguraikan tahapan kerja (sistem, mekanisme, dan prosedur kerja internal) yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas guna mencapai tujuan suatu lembaga pemerintah. (Atmoko Tjipto).²² Menurut Edward III dalam Widodo (2000: 18)²³, metode adalah serangkaian prosedur atau pendekatan berurutan yang memberikan deskripsi terperinci tentang bagaimana suatu tugas atau aktivitas dilaksanakan. Prosedur menentukan berbagai tugas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan program organisasi. Prosedur dibuat secara internal sebagai respons terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana serta kebutuhan akan konsistensi dalam cara perusahaan besar dan kompleks beroperasi.

Karena tidak sesuai untuk skenario atau program baru, prosedur rutin yang dibuat untuk situasi umum di masa lalu dapat menghambat perubahan kebijakan. Prosedur khususnya cenderung mempersulit pelaksanaan kebijakan baru yang membutuhkan jenis pekerja yang berbeda atau metode kerja baru. Kemungkinan suatu proses akan menghambat adopsi meningkat seiring dengan sejauh mana suatu kebijakan membutuhkan penyesuaian terhadap prosedur operasi standar organisasi.

"Tugas prosedur adalah memastikan bahwa di seluruh organisasi setiap orang melakukan sesuatu dengan cara yang sama dan beroperasi seperti yang dilakukan orang lain," kata Waller dalam Widodo (2000: 19). Lebih lanjut, deskripsi pekerjaan bukanlah prosedur. Prosedur harus menguraikan bagaimana semua tugas manajemen diselesaikan, siapa yang akan menyelesaikannya, bagaimana pencatatannya, dan pedoman tempat kerja yang diperlukan sebagai acuan.

2.2.4 Pendekatan Komunikasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan, komunikasi memegang peran sentral sebagai penghubung antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Lasswell (1951) merumuskan bahwa proses komunikasi dalam kebijakan melibatkan siapa yang menyampaikan apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dan dengan efek seperti apa. Komunikasi kebijakan tidak hanya soal penyampaian informasi, tapi juga menyangkut aspek budaya, bahasa lokal, literasi masyarakat, dan kapasitas interpretatif. Dalam pendekatan ini, aspek-aspek berikut menjadi penting bagi Media dan saluran komunikasi: Apakah informasi tentang kebijakan disampaikan melalui surat edaran, media sosial, rapat desa, atau pertemuan adat?
- Bahasa dan simbol: Apakah pesan kebijakan diterjemahkan dalam bahasa lokal atau dengan istilah teknis yang sulit dimengerti?
- Umpan balik: Apakah masyarakat diberikan ruang untuk menanggapi dan memberi

masuk?

Dalam konteks Morowali Utara yang memiliki keragaman budaya dan kondisi geografis yang menantang, pendekatan komunikasi menjadi sangat strategis untuk menghindari kesalahpahaman dan mendorong keterlibatan aktif warga.

2.2.5 Teori Jaringan Kebijakan (Policy Network)

Teori jaringan menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya dibentuk atau dijalankan oleh aktor negara (pemerintah), tetapi oleh interaksi kompleks antara berbagai aktor non-negara, seperti LSM, komunitas lokal, tokoh adat, sektor swasta, dan media. Rhodes (1997) menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, jaringan inilah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Dalam pengelolaan sampah, misalnya:

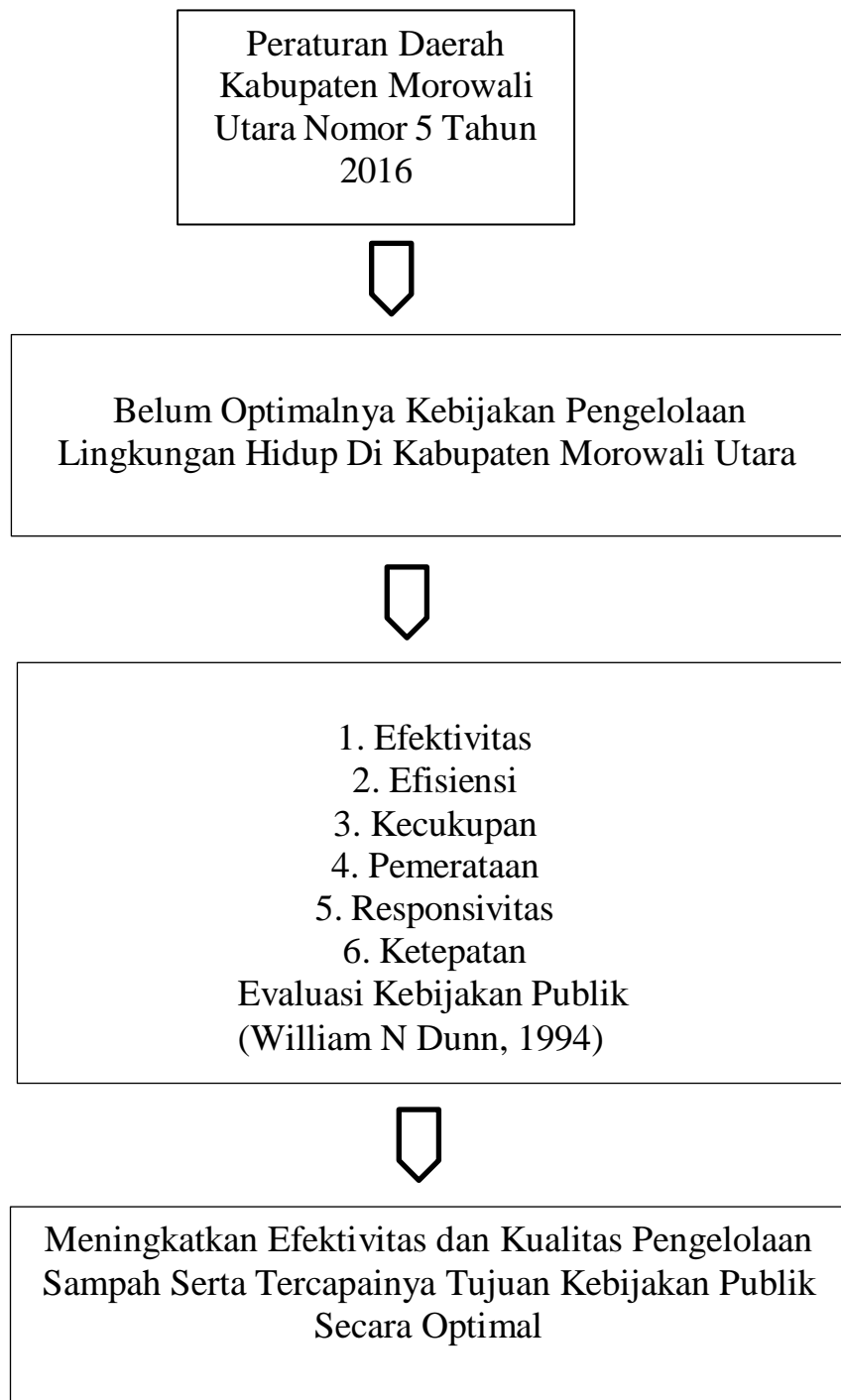
- Peran komunitas lokal (RT/RW, karang taruna) bisa lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat dibanding aparat desa.
- Kolaborasi dengan sektor swasta seperti perusahaan tambang atau pelaku daur ulang dapat meningkatkan kapasitas teknis dan pembiayaan.
- Tokoh agama atau adat dapat menjadi "agen legitimasi" dalam menyampaikan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Jaringan kebijakan yang kuat dan inklusif akan menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap kebijakan dan memperkecil resistensi di lapangan.

2.2.6 Pendekatan Budaya Kebijakan

Pendekatan ini menempatkan budaya lokal sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan. Douglas dan Wildavsky (1982) menyebut bahwa nilai- nilai budaya akan membentuk persepsi masyarakat terhadap risiko dan tanggung jawab kolektif. Dalam studi kebijakan pengelolaan sampah:\n- Apakah masyarakat menganggap sampah sebagai "aib publik", atau justru sebagai bagian dari kehidupan sehari- hari?\n- Apakah nilai gotong royong dan adat masih menjadi praktik hidup yang memengaruhi cara masyarakat membersihkan lingkungan?\n- Bagaimana agama dan spiritualitas membingkai tanggung jawab manusia terhadap alam? Pemahaman atas budaya lokal akan membantu merancang strategi implementasi yang lebih kontekstual dan diterima secara sosial.

2.3 Alur Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menggali makna secara mendalam dan naturalistik. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas (Yin, 2018).

Pemilihan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Model evaluasi Dunn dianggap relevan karena menawarkan pendekatan analitis yang sistematis dan menyeluruh dalam menilai kinerja sebuah kebijakan publik. Dunn (2003) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan bukan hanya menilai apakah kebijakan telah dilaksanakan, tetapi *“to determine the value or worth of a policy based on its outcomes and the extent to which it solves public problems.”* Dengan kata lain, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan publik yang menjadi latar belakang perumusannya.

Kerangka evaluasi Dunn terdiri dari enam dimensi utama, yaitu: (1) **efektivitas**, yang menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai; (2) **efisiensi**,

yang memeriksa keterbandingan antara manfaat yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan; **(3) kecukupan (*adequacy*)**, yang mengkaji apakah kebijakan mampu memberikan solusi yang cukup terhadap persoalan yang ada; **(4) pemerataan (*equity*)**, yang menilai apakah manfaat kebijakan dirasakan secara adil oleh kelompok sasaran; **(5) responsivitas (*responsiveness*)**, yaitu sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat; serta **(6) ketepatan (*appropriateness*)**, yaitu kecocokan kebijakan terhadap inti permasalahan yang ingin diselesaikan.

Penggunaan keenam dimensi ini memberikan peneliti ruang analisis yang lebih luas dan mendalam, tidak hanya pada aspek kebijakan secara normatif, tetapi juga pada aspek implementatif, teknis, sosial, dan kebermanfaatan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, teori Dunn dipandang paling sesuai karena mampu mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan kondisi empiris di lapangan, serta menggambarkan sejauh mana kebijakan tersebut telah menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan layanan persampahan. Oleh karena itu, teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dipilih sebagai pisau analisis utama untuk memastikan penelitian berjalan secara terukur, objektif, dan selaras dengan tujuan evaluasi kebijakan publik.

3.2 Definisi Konsep

Dalam penelitian ini, Evaluasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1994) dioperasionalkan sebagai suatu pendekatan konseptual yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik

hususnya dalam pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah dirumuskan dan dilaksanakan secara efektif, efisien, adil, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini dilakukan melalui lima dimensi utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan tanggung jawab.

1. Efektivitas

Secara operasional, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti mengurangi volume sampah yang dihasilkan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan. Indikator aspek ini meliputi: capaian program, realisasi target pengelolaan sampah, dan keberhasilan membangun kesadaran masyarakat.

2. Efisiensi

Efisiensi dioperasionalkan sebagai perbandingan antara sumber daya yang digunakan (anggaran, waktu, tenaga) dengan hasil yang diperoleh dari kebijakan pengelolaan sampah. Indikator dalam dimensi ini meliputi: kesesuaian alokasi anggaran, efektivitas penggunaan sarana dan prasarana, serta tingkat produktivitas kerja petugas lapangan.

3. Kecukupan

Kecukupan Berkaitan dengan sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan akses terhadap layanan persampahan. Indikator meliputi:

ketersediaan prasarana (TPA, TPS, TPS 3R), jumlah armada angkutan, dan layanan pengangkutan sampah di seluruh wilayah kecamatan.

4. Keadilan

Keadilan diartikan sebagai sejauh mana manfaat dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tersebar secara merata di seluruh Kabupaten Morowali Utara. Indikator dalam aspek ini antara lain: pemerataan armada dan layanan persampahan antara pusat kota dan daerah pinggiran, akses terhadap program masyarakat yang berwawasan lingkungan, dan tidak adanya disparitas antar wilayah dalam pelayanan.

5. Tanggung Jawab

Ketanggapan dioperasionalkan sebagai kemampuan kebijakan dan pelaksanaannya dalam menanggapi kebutuhan, pengaduan, dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Indikatornya antara lain: adanya saluran komunikasi publik, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan kecepatan tanggap pemerintah terhadap kebersihan lingkungan dan permasalahan lingkungan yang timbul di masyarakat.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara, yang berlokasi di Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih karena didasarkan pada permasalahan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya sampah, yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri yang meningkat di wilayah tersebut. Beberapa kecamatan yang menjadi focus penelitian dipilih berdasarkan Tingkat timbulan sampah dan

permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu bulan September – November 2025, Waktu tersebut mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- Wawancara : Peneliti menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terbuka dan fleksibel, seperti “Apa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah ?, atau “Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dilakukan di wilayah kabupaten Morowali Utara”. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan kontekstual (Patton, 2015).
- Observasi : Peneliti mengamati secara langsung proses pengelolaan sampah di lapangan, seperti kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan di TPA maupun TPS.
- Dokumentasi : Data dikumpulkan dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Data volume timbulan sampah, dokumen program kerja, serta laporan evaluasi kebijakan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bukti tertulis dan faktual yang mendukung hasil wawancara dan observasi.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) dalam proses pengumpulan data, karena peneliti berinteraksi langsung dengan informan, mengamati situasi, dan menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh (Moleong, 2017).

Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan instrumen pendukung sebagai berikut:

- Pedoman Wawancara: Disusun dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka yang mengarahkan peneliti dalam menggali informasi mendalam dari informan. Pertanyaan dirancang untuk menggali implementasi kebijakan, tantangan teknis dan nonteknis, partisipasi masyarakat, dan dampak kebijakan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara.
- Lembar Observasi: Digunakan untuk mencatat fenomena atau kegiatan lapangan yang relevan, seperti proses pengumpulan dan pembuangan sampah, ketersediaan sarana pengelolaan, dan respon masyarakat terhadap program lingkungan. Lembar ini disusun secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam mencatat data empiris secara objektif.
- Format Dokumentasi: Digunakan untuk menginventarisasi dokumen-dokumen penting yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah, seperti peraturan daerah, laporan pelayanan, grafik timbulan sampah, dan dokumen evaluasi kebijakan. Format ini membantu peneliti mencatat sumber, jenis, dan isi pokok setiap dokumen yang dianalisis. Dengan

gabungan ketiga instrumen ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6 Penentuan Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan informan melalui teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena peneliti memerlukan informan yang memiliki pemahaman langsung, pengalaman empiris, serta keterlibatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara. Informasi yang diperoleh dari informan diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara, karena memiliki peran sebagai penanggung jawab pelaksanaan kebijakan, penyedia layanan persampahan, dan koordinator program kebersihan wilayah. Kehadiran informan ini memungkinkan peneliti memperoleh data terkait arah kebijakan, strategi implementasi, program teknis, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah.

Selain itu, informan berikutnya adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara. Informan ini dipilih karena secara teknis terlibat dalam operasional pengelolaan sampah, mulai dari struktur layanan, fasilitas pendukung, data operasional persampahan, hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Peneliti juga melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, khususnya yang berperan dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan lingkungan. Kehadiran informan ini penting untuk memberikan perspektif kelembagaan terkait dukungan regulasi, alokasi anggaran, prioritas kebijakan daerah, serta fungsi kontrol terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Selain unsur kelembagaan tersebut, peneliti mewawancarai Camat Petasia dan Camat Lembo sebagai representasi wilayah yang memiliki kondisi layanan persampahan berbeda. Informasi dari tingkat kecamatan diperlukan untuk menggambarkan implementasi kebijakan secara operasional, dinamika teknis lapangan, kapasitas layanan, serta perbedaan kualitas pelaksanaan antar wilayah.

Untuk melengkapi data tersebut, informan terakhir adalah masyarakat sebagai penerima layanan atau pihak yang terdampak langsung oleh pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Keterlibatan informan dari masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan, persepsi, partisipasi, serta respons terhadap pelayanan persampahan yang diberikan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai kondisi data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru. Dengan demikian, pemilihan informan dalam penelitian ini dianggap telah mampu mendukung upaya menjawab rumusan

masalah penelitian secara komprehensif.

3.7 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam tentang implementasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara terbuka dengan teknik snowball sampling. Pemilihan teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informan yang benar-benar mengetahui permasalahan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dimulai dari informan kunci hingga berkembang kepada informan utama dan pendukung. Data primer diharapkan dapat memberikan informasi mendalam mengenai praktik pengelolaan sampah, efektivitas kebijakan, kendala di lapangan, serta persepsi masyarakat terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah.

- Wawancara terbuka dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara sebagai informan kunci.
- Wawancara dengan Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup.
- Wawancara dengan Camat Petasia dan Camat Lembo mengenai kondisi persampahan di wilayah masing-masing.
- Wawancara dengan Tokoh masyarakat.

- Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara

b. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai dokumen resmi, literatur akademik, dan publikasi lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis, pembanding, sekaligus penguat dari temuan data primer. Dokumen yang digunakan mencakup regulasi daerah, laporan resmi, data statistik, serta hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini akan memiliki pijakan yang kuat, baik dari sisi empirik maupun normatif Teknik Analisis Data

- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
- RPJMD Kabupaten Morowali Utara (periode terbaru).
- Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara.
- Data Statistik BPS Kabupaten Morowali Utara terkait jumlah penduduk, volume timbulan sampah, dan fasilitas persampahan.
- Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah sebagai regulasi nasional.
- Jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
- Publikasi media massa lokal dan nasional terkait isu persampahan di Morowali Utara

3.8 Teknik Analisis Data

Data Analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang terdiri dari tiga tahap utama:

- Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, maupun dokumen resmi. Istilah ini menggantikan konsep “reduksi data” yang digunakan dalam edisi lama, karena “reduksi” dianggap memberi kesan pengurangan nilai data. Kondensasi justru menekankan pada upaya memperkuat data melalui proses pengorganisasian yang sistematis sehingga data lebih tajam, bermakna, dan siap digunakan dalam analisis. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan coding, memberi label pada potongan data, serta mengembangkan kategori atau tema sementara yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini tidak berlangsung sekali saja, melainkan terus-menerus sepanjang penelitian.

Dalam konteks penelitian pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara, kondensasi data dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai isu utama seperti keterbatasan sarana prasarana, lemahnya kesadaran masyarakat, serta implementasi regulasi daerah. Misalnya, pernyataan informan tentang keterlambatan pengangkutan sampah dikodekan sebagai “kendala operasional”, sementara keluhan warga tentang rendahnya kesadaran masyarakat dikategorikan dalam tema “partisipasi publik”. Kondensasi ini memudahkan peneliti untuk tidak tenggelam dalam data

mentah yang begitu besar, tetapi tetap menjaga agar setiap data penting tidak terabaikan. Hasil dari tahap ini adalah data yang lebih ringkas namun tetap kaya informasi untuk analisis lanjutan.

- **Penyajian Data:**

Setelah data dikondensasi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti untuk memahami pola, menemukan keterkaitan antar-variabel, serta menguji hipotesis awal. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2020), penyajian data dapat berbentuk tabel, matriks, grafik, peta konsep, maupun diagram jaringan. Bentuk visualisasi ini membantu peneliti untuk melihat hubungan yang kompleks secara lebih sederhana. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan, tetapi juga sebagai sarana analisis untuk menemukan makna yang tersembunyi dalam data kualitatif.

Dalam penelitian ini, data disajikan melalui matriks yang menghubungkan kategori data dengan jenis informan. Misalnya, terdapat matriks yang membandingkan pendapat pejabat dinas, tokoh masyarakat, dan warga biasa mengenai efektivitas regulasi pengelolaan sampah. Penyajian data juga dapat menggunakan grafik yang menunjukkan seberapa sering isu tertentu muncul dalam wawancara, sehingga terlihat pola dominan. Dengan penyajian semacam ini, peneliti dapat lebih mudah menemukan titik temu maupun perbedaan pandangan antar-informan. Penyajian yang sistematis inilah yang nantinya menjadi dasar untuk melakukan interpretasi lebih mendalam

- **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi:**

Komponen terakhir dalam analisis data adalah penarikan serta verifikasi kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2020), penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian, namun sifatnya masih tentatif. Setiap temuan awal harus diverifikasi terus-menerus melalui pembandingan data, diskusi dengan informan, maupun triangulasi metode. Verifikasi ini penting agar kesimpulan yang ditarik bukan hasil asumsi peneliti, tetapi benar-benar lahir dari kekuatan data. Dengan demikian, kesimpulan akhir yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, misalnya, kesimpulan awal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah karena faktor kurangnya sosialisasi. Namun, kesimpulan tersebut harus diuji ulang dengan membandingkan data dari wawancara aparat pemerintah, dokumen kebijakan, dan pernyataan masyarakat. Jika ketiga sumber data menunjukkan arah yang sama, maka kesimpulan dapat diperkuat. Sebaliknya, jika ada perbedaan, maka peneliti perlu menggali lebih jauh penyebab perbedaan tersebut. Proses ini menjadikan analisis kualitatif lebih dinamis dan reflektif, sehingga hasil akhir penelitian benar-benar mencerminkan kondisi objektif di lapangan

- **Triangulasi**

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, dan perspektif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), triangulasi membantu meminimalkan bias dan memperkuat keandalan temuan

penelitian. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara:

- **Triangulasi sumber data:** membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti pejabat dinas, anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan warga biasa.
- **Triangulasi metode:** memadukan wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan.
- **Triangulasi teori:** menggunakan beberapa kerangka teoritis untuk menafsirkan fenomena yang sama.

Dengan triangulasi, temuan penelitian menjadi lebih kredibel dan dapat dipercaya karena diperoleh melalui pengecekan silang dari berbagai perspektif. Misalnya, kesimpulan mengenai rendahnya kesadaran masyarakat akan diperkuat jika semua sumber data menunjukkan pola yang sama, dan jika berbeda, peneliti dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan variasi tersebut

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Morowali Utara

Kabupaten Morowali Utara secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah yang meliputi kawasan pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan. Keragaman kondisi geografis ini memengaruhi pola pemukiman masyarakat serta menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan publik, termasuk pengelolaan sampah. Beberapa desa yang berada di wilayah perbukitan atau pegunungan sulit dijangkau oleh armada pengangkut sampah akibat kondisi jalan yang rusak atau belum beraspal, sehingga sampah sering kali tidak terangkut secara rutin.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan industri pertambangan nikel dan perkebunan sawit, yang menarik masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah penduduk diperkirakan telah mencapai lebih dari 120 ribu jiwa. Pertambahan jumlah penduduk secara otomatis meningkatkan volume timbulan sampah rumah tangga dan memperbesar beban layanan persampahan di wilayah ini.

Distribusi penduduk juga tidak merata. Sebagian besar masyarakat

tinggal di Kecamatan Petasia, yang merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, kecamatan lain seperti Lembo dan sekitarnya relatif jarang penduduk. Perbedaan kepadatan penduduk ini berimplikasi pada disparitas jumlah timbunan sampah, di mana volume sampah lebih tinggi di kawasan perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan. Kondisi ini membuat beban pengelolaan sampah di wilayah kota lebih berat, sedangkan di desa, tantangan utamanya adalah keterjangkauan layanan.

Selain faktor jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat juga memengaruhi komposisi sampah. Di kawasan perkotaan, jenis sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kemasan sekali pakai lebih dominan karena tingginya aktivitas perdagangan dan jasa. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, sampah organik dari sisa hasil pertanian, perkebunan, dan rumah tangga lebih banyak ditemukan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan sampah di Morowali Utara bersifat kompleks, bervariasi antar wilayah, dan membutuhkan strategi berbeda sesuai dengan karakteristik geografis maupun demografisnya

4.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Morowali Utara dipengaruhi oleh keragaman etnis, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Masyarakat lokal sebagian besar berasal dari suku Mori, Pamona, dan Bungku, yang memiliki tradisi gotong royong cukup kuat. Namun, arus migrasi yang datang akibat berkembangnya sektor pertambangan dan perkebunan membawa dinamika baru dalam

kehidupan sosial. Migrasi ini menciptakan permukiman-permukiman baru dengan heterogenitas sosial yang tinggi. Keanekaragaman ini di satu sisi memperkaya kehidupan sosial, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam membangun kesadaran kolektif terkait pengelolaan sampah.

Dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat di perkotaan telah memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas sekolah, sedangkan di wilayah pedesaan masih terdapat keterbatasan sarana pendidikan. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan cenderung lebih akrab dengan isu-isu lingkungan, meskipun dalam praktiknya partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah masih rendah. Sementara itu, di wilayah pedesaan, pengetahuan tentang pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah relatif terbatas.

Kondisi ekonomi Kabupaten Morowali Utara ditopang oleh beberapa sektor utama, yaitu pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pertambangan nikel. Kehadiran industri besar memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun, pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk pendatang dan perubahan gaya hidup masyarakat. Pola konsumsi yang lebih modern mendorong meningkatnya timbulan sampah anorganik, terutama plastik dan kemasan sekali pakai, yang sulit diuraikan secara alami.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di satu sisi membuka peluang

peningkatan kesejahteraan, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan lingkungan yang lebih kompleks. Industri tambang dan perkebunan menghasilkan limbah padat dalam jumlah besar, sementara aktivitas perdagangan dan rumah tangga menghasilkan sampah campuran yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi di Morowali Utara masih menghadapi dilema antara pertumbuhan dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga bagian penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan sosial-ekonomi di daerah.

4.1.3 Gambaran Permasalahan Persampahan

Permasalahan persampahan di Kabupaten Morowali Utara menjadi isu lingkungan yang cukup serius seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023, volume timbulan sampah di Kecamatan Petasia mencapai rata-rata 52–55 m³ per hari, sedangkan di Kecamatan Lembo sekitar 37–40 m³ per hari. Sumber utama sampah berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, pusat perkantoran, serta fasilitas umum. Peningkatan jumlah industri di daerah ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap bertambahnya volume sampah, baik organik maupun anorganik.

Keterangan	Nilai
Jumlah Penduduk (BPS 2024)	± 132.000 jiwa
Timbulan Sampah per Kapita	0,55 kg/orang/hari
Timbulan Sampah per Hari	72.600 kg/hari atau 72,6 ton/hari
Timbulan Sampah per Bulan	2.178 ton/bulan
Timbulan Sampah per Tahun	± 26.136 ton/tahun
Sampah yang Terangkut Sistem Formal	± 15–18 ton/hari (20–25%)
Sampah yang Tidak Terlayani (Mandiri/terbuang)	± 54–57 ton/hari (75–80%)

Tabel 4.1
Timbulan Sampah Kabupaten Morowali Utara
(Data BPS 2024 dan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2024)

Sistem pengelolaan sampah yang berjalan saat ini masih didominasi oleh pola konvensional kumpul–angkut–buang. Sampah yang terkumpul dari masyarakat langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pemilahan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan peluang untuk mendaur ulang atau memanfaatkan sampah menjadi kompos tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, TPA mengalami penumpukan yang cepat, dan risiko pencemaran lingkungan semakin meningkat.

Jenis Sampah	Persentase (%)	Estimasi Volume (Ton/Tahun)
Sisa Makanan/Organik	56%	14.635 ton/tahun
Plastik	18%	4.704 ton/tahun
Kertas/Karton	10%	2.614 ton/tahun
Logam	2%	523 ton/tahun
Kaca	3%	784 ton/tahun
Tekstil	4%	1.045 ton/tahun
Kayu/Karet	3%	784 ton/tahun
Residual (B3 Rumah Tangga & abu bakar sampah)	4%	1.045 ton/tahun
Total	100%	± 26.136 ton/tahun

Tabel 4.2
Komposisi Sampah Kabupaten Morowali Utara
(Data Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2024)

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi masalah utama dalam pengelolaan sampah di Morowali Utara. Armada pengangkut yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Beberapa truk pengangkut bahkan sudah berusia tua dan sering mengalami kerusakan. Selain itu, jumlah petugas kebersihan masih terbatas, sehingga wilayah pelayanan tidak dapat mencakup semua

desa. Hal ini membuat sebagian masyarakat, terutama di desa-desa terpencil, terpaksa membuang sampah ke sungai, kebun, atau membakarnya secara terbuka.

Masalah persampahan semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat. Sosialisasi tentang pemilahan dan pengelolaan sampah memang pernah dilakukan, namun sifatnya sporadis dan tidak berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat masih memandang persoalan sampah sebagai tanggung jawab penuh pemerintah daerah, bukan urusan bersama. Pola perilaku ini memperlihatkan adanya tantangan kultural dalam pengelolaan sampah, di mana regulasi yang ada belum mampu mendorong perubahan perilaku kolektif. Dengan demikian, permasalahan persampahan di Morowali Utara bersifat multidimensi, mencakup aspek teknis, sosial, kelembagaan, dan budaya.

Tahapan	Aktor Pelaksana	Kondisi Lapangan	Status Implementasi
Pengumpulan dari Rumah Tangga dan Fasilitas Publik	Masyarakat & Petugas Kebersihan	Sebagian besar tanpa pemilahan; pola penampungan tidak baku.	Berjalan namun belum sesuai standar
Penampungan Awal/Titik Drop Point	Masyarakat/RT & DLH	Menggunakan tempat sampah portable dan TPS tunggal.	Terbatas (hanya 1 TPS)
Pengangkutan	DLH (4 unit armada)	Melayani hanya 2 kecamatan (Petasia &	Tidak merata (20–25% wilayah)

Tahapan	Aktor Pelaksana	Kondisi Lapangan	Status Implementasi
		Lembo).	
Pemrosesan/Pengolahan	DLH	Tidak ada fasilitas 3R, komposting, atau daur ulang resmi.	Belum tersedia
Pembuangan Akhir	DLH	Sistem <i>open dumping</i> , bukan <i>sanitary landfill</i> .	Masih metode konvensional
Pemantauan, Pengawasan & Pengaduan Masyarakat	DLH & Media Informal (WhatsApp)	Mekanisme berjalan informal, belum berbasis sistem aplikasi atau database.	Masih terbatas

Tabel 4.3
Alur Pengelolaan Sampah
(Data Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2024)

4.1.4 Kebijakan Daerah tentang Persampahan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara secara normatif telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif mulai dari pengurangan, penanganan, penyediaan sarana, hingga pelibatan masyarakat dan dunia usaha. Meskipun secara regulatif telah tersedia kerangka hukum, implementasinya masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang memengaruhi mutu dan jangkauan layanan. Kondisi ini tercermin dari ketidakseimbangan

antara kebutuhan operasional dan kapasitas pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah.

Saat ini, pemerintah daerah telah menyediakan sarana berupa satu unit Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berfungsi sebagai titik transit sebelum sampah diangkut menuju tempat pemrosesan akhir. Selain itu, terdapat empat unit armada pengangkut sampah yang masih beroperasi aktif, dengan ritase terjadwal setiap hari. Namun, kapasitas armada ini hanya mampu melayani dua kecamatan yaitu Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo, yang merupakan pusat mobilitas penduduk dan pusat kegiatan ekonomi kabupaten. Sementara delapan kecamatan lainnya belum tercakup dalam layanan resmi dan masih mengelola sampah secara mandiri melalui pembakaran atau pembuangan di ruang terbuka.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), jumlah petugas kebersihan sebanyak 22 orang belum sebanding dengan kebutuhan ideal yang direkomendasikan untuk wilayah dengan karakteristik geografis seperti Morowali Utara. Dengan wilayah kabupaten yang luas dan makin berkembang, idealnya dibutuhkan minimal 40 hingga 60 petugas untuk memastikan pemerataan layanan operasional, penyapuan jalan, pengangkutan sampah, dan pengawasan fasilitas persampahan. Kondisi kurangnya SDM berdampak langsung pada frekuensi pengangkutan, efektivitas penyapuan, serta respons pemerintah terhadap laporan warga.

Jika dilihat dari potensi timbulan sampah, berdasarkan estimasi

timbulan sampah 0,55 kg per orang per hari dengan jumlah penduduk ± 132.000 jiwa, maka total sampah dihasilkan sekitar 72,6 ton per hari, atau setara 2.178 ton per bulan dan 26.136 ton per tahun. Namun kapasitas layanan formal pemerintah daerah baru mampu menangani sekitar 15 hingga 18 ton per hari, atau sekitar 20–25% dari total timbulan yang ada. Artinya, lebih dari setengah sampah yang dihasilkan masyarakat tidak terkelola melalui mekanisme formal, dan hal ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang seperti pencemaran tanah, udara, dan badan air.

Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan saat ini masih mengadopsi model kumpul–angkut–buang (collect–transport–dispose) tanpa fasilitas pemilahan, pengolahan, atau daur ulang berbasis 3R. Hingga saat ini belum tersedia Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPS 3R, maupun bank sampah berbasis regulasi dan operasional kelembagaan. Dengan demikian, siklus pengelolaan masih bersifat linear dan belum menuju model pengelolaan berbasis ekonomi sirkular sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional pengelolaan sampah.

Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan formal, implementasi kebijakan masih membutuhkan penguatan dari sisi anggaran, kelembagaan, perencanaan operasional, dan partisipasi publik. Untuk itu, percepatan transformasi sistem persampahan di Kabupaten Morowali Utara memerlukan strategi lanjutan yang lebih komprehensif, termasuk penambahan fasilitas, penyusunan SOP teknis,

penguatan edukasi publik, dan peningkatan kapasitas layanan secara bertahap dan berkelanjutan.

Komponen	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Dasar Hukum	Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah	Menjadi acuan utama pengelolaan persampahan daerah
Armada Pengangkut	4 unit aktif	Melayani Kecamatan Petasia & Lembo
Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1 unit aktif	Masih belum mencukupi kebutuhan wilayah
SDM Petugas Kebersihan	22 orang	Kebutuhan ideal 40–60 orang
Sarana Pendukung (Temp. Sampah Portable)	Ada pada area publik tertentu	Belum merata dan belum memiliki sistem pemeliharaan rutin
Timbulan Sampah	$\pm 72,6$ ton/hari (26.136 ton/tahun)	Berdasarkan estimasi 0,55 kg/org/hari dari 132.000 jiwa
Sampah Terangkut	± 15 –18 ton/hari (≈ 20 –25%)	Hanya meliputi dua kecamatan
Sistem	Kumpul–angkut–	Belum tersedia fasilitas 3R atau

Komponen	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Pengelolaan	buang	bank sampah berbasis kelembagaan
Wilayah Terlayani	2 dari 10 kecamatan	8 kecamatan belum menerima layanan pemerintah
Keterlibatan Masyarakat	Rendah	Pengelolaan mandiri dominan pembakaran dan pembuangan terbuka

Tabel 4.4
Gambaran Pengelolaan Sampah di Kabupaten Morowali Utara
(Data : Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2024)

4.2 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara. Pembahasan difokuskan pada bagaimana kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun kesadaran masyarakat. Temuan lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan kebijakan dan pelaksanaannya, terutama dalam hal keterbatasan fasilitas, manajemen pengangkutan, dan partisipasi masyarakat terhadap program kebersihan lingkungan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah, analisis dalam bab ini menggunakan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1994). Menurut Dunn, keberhasilan sebuah kebijakan publik dapat diukur melalui enam dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam dimensi ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui pendekatan ini, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga pada proses implementasi, pemanfaatan sumber daya, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pembahasan dalam bab ini disusun berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang menggabungkan pandangan para informan kunci—seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, camat, petugas lapangan, anggota DPRD, serta tokoh masyarakat—dengan data sekunder dari laporan resmi dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap dimensi evaluasi dibahas secara berurutan untuk menggambarkan kondisi aktual dan memberikan analisis kritis terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan, hambatan, serta peluang perbaikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara.

a. Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu tolok ukur penting dalam mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan publik. William N. Dunn (1994) menjelaskan

bahwa efisiensi mengacu pada perbandingan antara hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Dengan kata lain, suatu kebijakan dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan keluaran maksimal dengan penggunaan biaya, tenaga, dan waktu seminimal mungkin. Dalam administrasi publik, efisiensi menjadi prinsip dasar yang menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola anggaran dan sumber daya agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, efisiensi juga diartikan sebagai kemampuan lembaga publik untuk menekan pemborosan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Prinsip ini erat kaitannya dengan konsep *value for money*, yang menuntut setiap penggunaan dana publik harus menghasilkan nilai tambah yang sepadan. Pemerintah yang efisien bukan hanya mampu menghemat biaya, tetapi juga memastikan setiap kegiatan menghasilkan dampak yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efisiensi menjadi indikator penting untuk menilai apakah kebijakan pengelolaan sampah telah dijalankan secara optimal dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks penelitian ini, efisiensi dimaknai sebagai kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Penilaian efisiensi mencakup penggunaan anggaran, pengelolaan armada, produktivitas tenaga kerja, dan pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki. Pertanyaan yang menjadi dasar analisis dalam dimensi ini adalah sejauh mana kebijakan pengelolaan

sampah telah berjalan efisien dalam penggunaan sumber daya yang tersedia dan apakah hasilnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan kebijakan masih bervariasi antarwilayah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara menyatakan bahwa :

“Armada kami memang terbatas, tetapi kami maksimalkan ritase hariannya. Yang penting titik-titik sampah yang paling padat tetap terlayani dulu.” (Wawancara, 2025)

Beberapa aspek menunjukkan kemajuan yang berarti, seperti perbaikan jadwal pengangkutan dan peningkatan operasional kendaraan. Dari sepuluh unit truk pengangkut yang dimiliki, tujuh unit kini telah beroperasi rutin setiap hari, sementara tiga lainnya sedang dalam proses perbaikan. Kepala Dinas menjelaskan bahwa optimalisasi jadwal kerja dan rute pengangkutan membantu menekan biaya bahan bakar serta menghemat waktu kerja petugas lapangan.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan bahwa :

“Kalau ditanya cukup atau tidak, jelas belum. Tapi dengan yang ada, kami sudah mengatur rute supaya tidak ada tumpukan terlalu lama.” (Wawancara, 2025)

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2023, telah dilakukan pengaturan ulang wilayah layanan berdasarkan kedekatan lokasi dan volume sampah. Sistem ini diterapkan untuk mengurangi perjalanan panjang armada yang sebelumnya sering menempuh rute tidak efisien. Melalui zonasi sederhana,

armada kini difokuskan pada area dengan volume timbulan tinggi seperti pusat kota dan pasar Kolonodale. Dampaknya terlihat dari penurunan waktu tempuh rata-rata dan peningkatan jumlah ritase per hari.

Petugas lapangan juga menyebutkan adanya peningkatan koordinasi operasional. Jika pada tahun-tahun sebelumnya jadwal pengangkutan sering tertunda, kini pelaksanaannya lebih teratur. Di Kelurahan Kolonodale dan Bahoue, armada diterjunkan dua kali sehari pada jam tetap, sementara di wilayah perumahan dan fasilitas umum dilakukan pengangkutan satu kali setiap hari. Peningkatan disiplin kerja dan pembagian jadwal shift membuat waktu kerja lebih efisien serta penumpukan sampah dapat dikurangi secara signifikan.

Meskipun demikian, tantangan efisiensi masih terlihat terutama pada wilayah yang jauh dari pusat kota. Di Kecamatan Lembo Raya dan Mamosalato, keterbatasan armada membuat pengangkutan tidak bisa dilakukan setiap hari. Faktor jarak dan kondisi jalan yang rusak turut memperlambat waktu operasional. Petugas juga mengakui bahwa jumlah personel belum seimbang dengan luas wilayah pelayanan. Namun, pemerintah daerah telah menambah beberapa tenaga kebersihan baru sejak 2024 untuk memperkuat tim lapangan dan memperbaiki kinerja operasional.

Dari sisi perencanaan keuangan, efisiensi juga mulai ditingkatkan dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa penyusunan anggaran kegiatan kebersihan kini disertai indikator hasil, seperti peningkatan volume sampah

yang terangkut dan pengurangan timbulan sampah di titik kritis. Laporan kinerja bidang kebersihan kini masuk dalam dokumen LAKIP, sehingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilakukan secara terukur dan transparan.

Beberapa masyarakat yang diwawancarai juga mengakui adanya perbaikan dalam ketepatan waktu pelayanan. Di kawasan perkotaan, pengangkutan sampah kini lebih rutin dan jarang mengalami penundaan. Masyarakat menilai petugas lebih disiplin dan mulai menjaga hubungan yang baik dengan warga. Kondisi ini menjadi bukti bahwa meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas, aspek efisiensi sudah menunjukkan perbaikan dalam hal pelayanan publik.

Pemerintah daerah juga menunjukkan langkah efisiensi dengan memanfaatkan kembali sarana yang sebelumnya tidak aktif. Beberapa kendaraan lama telah diperbaiki menggunakan dana pemeliharaan internal, sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus membeli unit baru. Dinas Lingkungan Hidup juga mulai menggunakan peralatan manual tambahan seperti gerobak motor dan tong dorong untuk menjangkau gang-gang kecil yang tidak bisa diakses truk besar. Langkah sederhana ini terbukti mampu menekan biaya bahan bakar dan mempercepat proses pengumpulan sampah.

Data sekunder dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp2,3 miliar, sekitar 60 persen digunakan untuk biaya operasional kendaraan dan bahan bakar, sementara sisanya untuk upah tenaga

kebersihan dan pemeliharaan sarana. Rasio antara biaya dan hasil menunjukkan peningkatan, di mana volume sampah yang terangkut naik dari 52 persen pada 2022 menjadi 61 persen pada 2023, tanpa peningkatan anggaran yang signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber daya telah lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mulai menerapkan sistem pelaporan harian berbasis formulir sederhana. Setiap petugas wajib mencatat rute, jumlah ritase, dan estimasi volume sampah yang diangkut setiap hari. Laporan ini dikumpulkan setiap akhir minggu untuk dievaluasi oleh kepala bidang. Walaupun masih dilakukan secara manual, langkah ini menunjukkan upaya perbaikan sistem administrasi operasional yang lebih efisien dan akuntabel.

Peneliti menilai bahwa langkah-langkah tersebut merupakan indikasi kuat bahwa efisiensi pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara mulai menunjukkan arah perbaikan. Pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan penggunaan armada dan waktu kerja, memperbaiki koordinasi internal, serta mulai menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Upaya sederhana seperti zonasi layanan dan perawatan armada secara mandiri telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap efisiensi biaya dan waktu kerja.

Namun demikian, peningkatan efisiensi masih memerlukan dukungan sistem digitalisasi dan perencanaan berbasis data. Tanpa data yang akurat dan teknologi pelacakan, pemerintah akan sulit memantau kinerja lapangan secara real time. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi

operasional kebersihan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan efisiensi yang telah dicapai.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara sudah menunjukkan kemajuan nyata dalam aspek efisiensi. Pemerintah telah memulai perubahan menuju sistem kerja yang lebih teratur, hemat sumber daya, dan berorientasi hasil. Meskipun masih menghadapi keterbatasan armada dan personel, arah perbaikan yang ditempuh telah berjalan ke jalur yang benar. Dengan konsistensi kebijakan, peningkatan manajemen data, serta penguatan koordinasi antarbidang, efisiensi pengelolaan sampah di Morowali Utara diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

b. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja suatu kebijakan publik. William N. Dunn (1994) menekankan bahwa efektivitas dilihat dari sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Dalam kebijakan pengelolaan sampah, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh tersedianya armada dan petugas, tetapi juga oleh dampak kebijakan terhadap kebersihan lingkungan, ketertiban pengelolaan sampah, serta kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Dalam penelitian ini, efektivitas dimaknai sebagai kemampuan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara mencapai tujuan Perda Nomor 5 Tahun 2016. Dimensi efektivitas mencakup pencapaian hasil nyata, seperti pengurangan sampah yang menumpuk, peningkatan ketertiban pengangkutan, dan meningkatnya keterlibatan

masyarakat.

Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih sangat terbatas karena layanan pengangkutan sampah hanya tersedia di dua kecamatan, yaitu Petasia (pusat kota Kolonodale) dan Lembo. Sementara itu, delapan kecamatan lainnya belum tersentuh layanan pengangkutan, sehingga masyarakat mengelola sampah secara mandiri melalui cara dibakar, ditanam, atau dibuang ke lahan terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum merata karena kapasitas pelayanan masih terfokus pada wilayah tertentu.

Hal tersebut tercermin dalam pernyataan beliau :

“Efektivitas pelayanan sudah mulai terlihat, terutama di wilayah perkotaan. Dulu banyak sampah menumpuk berhari-hari, tapi sekarang kami sudah punya jadwal tetap dan ritase lebih sering, sehingga lokasi-lokasi yang biasanya penuh sampah sudah lebih terkendali.” (Wawancara, 2025)

Meski demikian, sejumlah capaian positif tetap terlihat pada wilayah yang mendapatkan layanan resmi. Dalam pernyataannya Camat Petasia menyampaikan bahwa :

“Kalau kita lihat sekarang, sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dulu sampah bisa menumpuk sampai dua atau tiga hari, tetapi sekarang pengangkutan dilakukan lebih rutin, dan itu terlihat dari kondisi pasar yang sekarang lebih bersih dibandingkan tahun lalu.” (Wawancara, 2025)

Di Kecamatan Petasia, efektivitas pengangkutan meningkat setelah pemerintah mengoptimalkan ritase harian dan memperbaiki rute. Tahun 2024, armada yang beroperasi di Petasia melakukan pengangkutan dua kali sehari di beberapa titik padat seperti jalan protokol Kolonodale, pasar raya,

dan pusat perkantoran. Peningkatan ini berhasil mengurangi penumpukan sampah di titik-titik yang sebelumnya rawan.

Dalam pernyataannya Camat Lembo menyampaikan bahwa :

“Efektivitasnya memang terasa, tetapi lebih dominan di wilayah inti kota. Untuk wilayah ujung yang agak jauh, masih ada waktu tunggu yang lebih lama karena armada masih terbatas.” (Wawancara, 2025)

Meskipun frekuensi pengangkutan tidak seintensif Petasia, efektivitas layanan tetap mengalami peningkatan. Armada melakukan pengangkutan minimal 3–4 kali seminggu, bergantung pada volume sampah. Petugas lapangan menyebut bahwa penentuan hari pengangkutan kini lebih terjadwal sehingga pekerjaan lebih terkontrol dan tidak lagi bersifat spontan seperti beberapa tahun sebelumnya.

Dari sisi pelaksana teknis, petugas kebersihan menyampaikan bahwa efektivitas mereka meningkat karena terdapat pembagian tugas yang jelas antara wilayah kota dan wilayah permukiman. Petugas menyebut bahwa sejak 2024, supervisi lapangan dilakukan lebih rutin, terutama di Kelurahan Kolonodale dan Bahoue, sehingga penanganan sampah lebih cepat dan konsisten. Peningkatan disiplin kerja juga membantu mengurangi keterlambatan pengangkutan.

Masyarakat di Kecamatan Petasia mengakui adanya peningkatan kualitas pelayanan kebersihan pada tahun 2024. Pengangkutan yang lebih teratur membuat sampah lebih jarang menumpuk, terutama setelah ditempatkan beberapa tong sampah portable di area publik. Warga menilai bahwa meskipun kapasitas pemerintah terbatas, upaya peningkatan layanan di pusat kota cukup dirasakan manfaatnya.

Namun, masyarakat di kecamatan lain seperti Mori Atas, Mori Utara, Petasia Timur, dan Bungku Utara menyampaikan kondisi berbeda. Karena tidak ada layanan pengangkutan, mereka mengelola sampah dengan cara membakar atau membuangnya ke kebun, sungai, dan lahan kosong. Dampaknya, tingkat efektivitas kebijakan di tingkat kabupaten secara keseluruhan masih rendah karena sistem layanan belum melampaui dua kecamatan. Keluhan masyarakat terutama terkait kurangnya perhatian terhadap wilayah pedesaan.

Anggota DPRD Morowali Utara menilai bahwa efektivitas kebijakan tidak akan tercapai sepenuhnya apabila layanan pengangkutan hanya mencakup sebagian kecil wilayah. Ia menekankan bahwa efektivitas harus dilihat dari ketercapaian seluruh sasaran, bukan hanya pusat kota. Namun, ia juga menilai bahwa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan di Kecamatan Petasia dan Lembo pada 2024 merupakan fondasi awal yang positif bagi perluasan layanan ke wilayah lainnya.

Dalam pernyataannya, anggota DPRD menyampaikan:

“Perubahannya memang sudah mulai terlihat di pusat kota. Sampah di pasar dan sekitar fasilitas umum sudah tidak lagi menumpuk seperti dulu. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam pelaksanaannya.” (Wawancara, 2025)

Dari sisi operasional, pemerintah daerah telah berupaya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) internal untuk memastikan ritase berjalan sesuai jadwal. Pada tahun 2024, pengawasan lebih diperkuat sehingga tingkat keterlambatan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun SPM ini belum diterapkan di seluruh kecamatan, implementasinya di dua kecamatan yang dilayani memberikan contoh

bahwa efektivitas dapat meningkat apabila ada pedoman kerja yang jelas.

Peningkatan efektivitas juga didukung oleh tambahan sarana sederhana seperti tong sampah portable yang ditempatkan pada jalur protokol dan area pasar pada tahun 2024. Penempatan sarana ini membantu masyarakat membuang sampah pada tempatnya sehingga mempermudah proses pengangkutan. Di sisi lain, di kecamatan yang belum ada layanan, sarana seperti ini belum tersedia.

Dari sisi internal, koordinasi antarpetugas dan pimpinan bidang menunjukkan kemajuan. Kepala bidang melakukan inspeksi lapangan lebih intensif, terutama pada jam-jam rawan penumpukan sampah. Peningkatan pengawasan ini membuat respons terhadap masalah menjadi lebih cepat, khususnya di wilayah pusat kota. Hal ini menjadi bukti bahwa efektivitas dapat meningkat apabila ada kontrol harian yang konsisten.

Data sekunder tahun 2024 memberikan gambaran yang lebih objektif tentang tingkat efektivitas. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024:

- Volume sampah terangkut mencapai 67% di dua kecamatan yang dilayani (Petasia dan Lembo)
- Terdapat penurunan titik penumpukan menjadi 9 titik di wilayah kota,
- Frekuensi pelayanan di Petasia naik menjadi 6 hari kerja per minggu
- Tidak ada data pengangkutan untuk delapan kecamatan lainnya karena layanan belum tersedia.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan cukup

tinggi di wilayah yang dilayani, namun tingkat efektivitas kabupaten secara keseluruhan tetap rendah karena cakupan layanan belum luas.

Peneliti menilai bahwa efektivitas kebijakan secara parsial menunjukkan kemajuan, terutama di dua kecamatan yang sudah mendapatkan layanan rutin. Namun, efektivitas kabupaten secara umum belum tercapai karena sebagian besar wilayah belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai. Dengan demikian, efektivitas kebijakan dapat dikatakan “lokal dan terbatas”, belum bersifat menyeluruh.

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 menunjukkan tren positif di wilayah yang dilayani, namun masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan. Perluasan pelayanan ke kecamatan lainnya menjadi kunci utama untuk meningkatkan efektivitas secara menyeluruh. Dengan konsistensi perbaikan operasional serta penambahan sarana dan armada, efektivitas pengelolaan sampah di daerah ini berpotensi meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

c. Kecukupan (Adequacy)

Kecukupan merupakan salah satu dimensi penting dalam evaluasi kebijakan publik yang menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu menyediakan sumber daya, sarana, dan prosedur yang memadai untuk mengatasi masalah utama yang menjadi sasaran kebijakan. William N. Dunn (1994) menyebut kecukupan sebagai kemampuan kebijakan memberikan solusi yang cukup terhadap skala masalah. Dalam konteks pengelolaan sampah, kecukupan tidak hanya dinilai dari keberadaan

armada dan petugas, tetapi juga dari ketersediaan TPS, pola manajemen operasional, penyediaan sarana pembuangan, serta kemampuan masyarakat mengakses layanan kebersihan yang layak.

Dalam penelitian ini, kecukupan dimaknai sebagai kesesuaian antara kebutuhan penanganan sampah di Kabupaten Morowali Utara dan kapasitas kebijakan yang dijalankan pada tahun 2024. Kecukupan ini mencakup cakupan pelayanan, sarana pendukung, kekuatan kelembagaan, ketersediaan anggaran, dan kemampuan kebijakan menjangkau seluruh wilayah.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa kecukupan layanan masih jauh dari ideal karena pelayanan pengangkutan hanya tersedia di dua kecamatan.

Dalam pernyataannya, beliau menegaskan:

“Kalau kita berbicara soal kecukupan, secara jujur saya harus mengatakan bahwa kondisi saat ini belum mencukupi. Armada yang tersedia masih empat unit dan hanya mampu menjangkau sebagian wilayah. Belum lagi fasilitas pendukung seperti TPS maupun TPS 3R yang sebenarnya sangat dibutuhkan belum dapat kita realisasikan karena keterbatasan anggaran.”(Wawancara, 2025)

Sementara itu, delapan kecamatan lainnya belum memiliki layanan pengangkutan, TPS formal, maupun fasilitas pembuangan yang layak. Masyarakat di wilayah tersebut mengelola sampah secara mandiri, baik dengan membakar, mengubur, maupun membuang ke lahan terbuka. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan besar dalam kecukupan kebijakan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan menambahkan bahwa keterbatasan kecukupan berkaitan erat dengan

minimnya sarana dan prasarana.

Dalam penyampaianannya, ia mengatakan:

“Kalau kita melihat dari aspek kecukupan, sebenarnya yang kita miliki sekarang masih sangat terbatas. Armada hanya empat unit dan itu hanya bisa melayani sebagian wilayah saja, terutama Petasia sebagai pusat pelayanan. Daerah lain belum bisa kita jangkau karena keterbatasan sarana dan operasional.”(Wawancara, 2025)

Kabupaten Morowali Utara hanya memiliki satu TPS yang berfungsi optimal, yaitu di Kecamatan Petasia. Di Lembo, ada beberapa titik pembuangan informal, tetapi belum memenuhi standar teknis. Di kecamatan lain, masyarakat membuat TPS swadaya sederhana, namun tidak berfungsi baik karena tidak diangkut secara rutin. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan belum mampu menyediakan fasilitas dasar yang cukup bagi masyarakat.

Petugas lapangan menyampaikan bahwa kecukupan sarana operasional juga masih terbatas. Armada yang tersedia sebagian besar beroperasi di wilayah Petasia, sementara di Lembo jumlah armada masih sangat minim. Tidak adanya kendaraan kecil (pick-up atau motor sampah) juga membuat penjangkauan wilayah sempit menjadi sulit. Di sisi petugas, ketersediaan sarung tangan, sekop, keranjang sampah, dan peralatan kerja lainnya masih belum lengkap sehingga efektivitas kerja tidak optimal.

Masyarakat di wilayah Kolonodale, Bahoue, dan sekitarnya mengakui adanya peningkatan layanan pada tahun 2024, namun mereka juga menilai bahwa fasilitas seperti tong sampah, tempat penampungan, dan jalur pengangkutan masih terbatas jumlahnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kualitas layanan, kecukupan sarana masih

belum memenuhi skala kebutuhan masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat di delapan kecamatan nonlayanan mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap fasilitas pembuangan yang layak sama sekali. Beberapa desa hanya memiliki lubang galian yang dijadikan tempat pembuangan akhir secara mandiri. Ada pula desa yang membuang sampah di sungai karena tidak ada alternatif lain. Situasi ini menandakan bahwa kecukupan kebijakan sangat timpang antara pusat kota dan daerah lain.

Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara menilai bahwa kecukupan kebijakan belum tercapai karena prioritas penganggaran belum diarahkan pada perluasan fasilitas dasar. Menurutnya, APBD yang ada masih habis untuk operasional rutin sehingga tidak menyediakan ruang untuk investasi pembangunan TPS baru, pembelian kendaraan kecil, atau pembentukan unit pengelola sampah di desa. Ia juga menyebut bahwa tanpa dukungan sarana, kebijakan tidak akan cukup menjangkau seluruh masyarakat.

Dalam pernyataannya ia menjelaskan:

“Kalau dilihat dari pelaksanaannya, memang sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Tetapi kalau kita bicara kecukupan, layanan yang ada sekarang belum bisa menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Masih banyak kecamatan yang tidak terjangkau layanan, sehingga masyarakat harus mengelola sampah sendiri.”(Wawancara, 2025)

Meski begitu, terdapat beberapa aspek positif yang menunjukkan arah perbaikan kecukupan pada tahun 2024. Pemerintah daerah telah melakukan perbaikan armada yang sebelumnya rusak, sehingga tujuh dari sepuluh unit kini dapat beroperasi kembali. Selain itu, pemerintah juga menambah beberapa titik tong sampah portable di jalur protokol Kolonodale, yang

meskipun kecil, mendukung upaya penanganan sampah pada area publik.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mencoba meningkatkan kecukupan sarana meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Kepala Bidang juga menjelaskan bahwa beberapa desa mulai membangun TPS sederhana secara swadaya sebagai respons terhadap minimnya fasilitas. Walaupun belum memenuhi standar, hal ini menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat. Pemerintah daerah memandang inisiatif seperti ini sebagai langkah positif yang dapat dikembangkan melalui pembinaan dan pendampingan. Perubahan ini menunjukkan adanya sinergi awal antara masyarakat dan pemerintah dalam menutupi kekurangan fasilitas.

Data sekunder tahun 2024 memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kecukupan layanan. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2024:

- Hanya 2 dari 10 kecamatan yang mendapatkan layanan pengangkutan sampah,
- Hanya 1 kecamatan yang memiliki TPS yang berfungsi (Petasia),
- Jumlah petugas kebersihan hanya 85 orang, dengan rasio 1 petugas untuk ± 300 rumah tangga,
- Armada aktif berjumlah 4 unit, seluruhnya beroperasi untuk dua kecamatan layanan,
- Tidak ada fasilitas pemilahan atau pengolahan modern (TPST/3R) di seluruh kabupaten.

Data tersebut menunjukkan bahwa kecukupan sangat terbatas, terutama dalam aspek cakupan layanan dan fasilitas teknis.

Peneliti menilai bahwa kecukupan kebijakan pengelolaan sampah di Morowali Utara masih rendah karena kesenjangan antara skala permasalahan dan kapasitas penanganan. Namun, beberapa langkah positif pemerintah seperti perbaikan armada, penambahan titik tong sampah, dan konsistensi layanan di dua kecamatan merupakan modal awal untuk meningkatkan kecukupan di masa depan.

Secara keseluruhan, kecukupan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara masih berada pada tahap dasar. Layanan hanya tersedia di sebagian kecil wilayah, sementara mayoritas masyarakat belum memperoleh akses yang layak. Namun, terdapat tanda-tanda positif berupa peningkatan sarana, perbaikan armada, dan inisiatif masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk memperluas kecukupan layanan di tahun-tahun mendatang. Dengan penguatan anggaran, penambahan armada, serta pembangunan TPS di kecamatan nonlayanan, kecukupan kebijakan berpotensi meningkat secara bertahap.

d. Pemerataan (Equity)

Pemerataan merupakan dimensi penting dalam evaluasi kebijakan publik karena menilai sejauh mana manfaat kebijakan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, tanpa adanya diskriminasi wilayah, kelompok sosial, maupun tingkat akses. William N. Dunn (1994) mendefinisikan pemerataan sebagai tingkat keadilan distribusi manfaat dan beban kebijakan. Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerataan dapat

diukur dari distribusi layanan pengangkutan, penyediaan sarana pembuangan, ketersediaan tong sampah, serta kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam program kebersihan.

Dalam penelitian ini, pemerataan dimaknai sebagai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara mampu menjangkau seluruh kecamatan dan memberikan hak pelayanan yang setara kepada masyarakat. Pertanyaan utama yang dikaji adalah apakah pelayanan kebersihan memiliki cakupan luas, ataukah hanya menguntungkan sebagian wilayah tertentu.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa tingkat pemerataan layanan masih sangat rendah.

Beliau menyampaikan:

“Untuk distribusi layanan, memang saat ini masih fokus di wilayah tertentu saja yang sudah memiliki akses armada. Belum semua kecamatan terjangkau karena sarana yang ada belum mencukupi untuk membagi pelayanan secara merata.”
(Wawancara, 2025)

Pada tahun 2024, layanan pengangkutan sampah hanya dilakukan di dua kecamatan, yakni Petasia dan Lembo. Sementara itu, delapan kecamatan lainnya tidak menerima layanan pengangkutan, sehingga masyarakat mengolah sampah rumah tangga secara mandiri atau membuangnya ke lahan terbuka. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam penerimaan manfaat kebijakan.

Namun demikian, Kepala Dinas menyampaikan bahwa pemerintah sudah mulai merencanakan perluasan jangkauan pelayanan secara bertahap. Upaya ini dilakukan melalui pengajuan penambahan armada,

perencanaan pembangunan TPS tambahan, serta penyusunan strategi daerah untuk pengelolaan sampah berbasis desa.

Beliau menutup pernyataan dengan mengatakan:

“Harapan kami, setelah sarana bertambah dan ada penyesuaian strategi layanan, pemerataan ini bisa dicapai secara bertahap. Targetnya bukan hanya pelayanan pengangkutan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber.”
(Wawancara, 2025)

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan menegaskan bahwa ketimpangan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian, melainkan keterbatasan sarana yang sangat mendasar. Pada tahun 2024, hanya empat unit armada yang benar-benar beroperasi dari total sepuluh kendaraan yang dimiliki. Keempat unit ini difokuskan di Kecamatan Petasia dan Lembo mengingat kedua wilayah tersebut memiliki timbulan sampah tertinggi serta merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan.

Petugas lapangan mengakui bahwa pembagian wilayah kerja tidak seimbang karena keterbatasan armada membuat layanan tidak dapat diperluas ke kecamatan lain. Mereka menyebut bahwa medan berat, jarak yang jauh, serta kondisi jalan yang rusak di beberapa kecamatan nonlayanan membuat pengangkutan ke wilayah tersebut tidak memungkinkan dengan kondisi armada yang ada. Hal ini memperkuat fakta bahwa pemerataan layanan tidak tercapai bukan karena tidak diupayakan, tetapi karena kapasitas teknis tidak memadai.

Masyarakat di pusat kota Kolonodale menyampaikan bahwa mereka merasakan peningkatan layanan pada 2024. Pengangkutan sampah lebih

tepat waktu, tong sampah tambahan ditempatkan di titik-titik strategis, dan petugas lebih sering berkeliling. Namun, masyarakat di kecamatan lain merasa tidak mendapatkan perhatian yang sama. Mereka harus mengolah sampah sendiri, bahkan beberapa desa mengandalkan pembakaran terbuka sebagai satu-satunya metode penanganan. Kondisi ini mempertegas disparitas antarwilayah.

Warga dari Kecamatan Petasia Timur dan Mori Atas mengungkapkan bahwa mereka mengharapkan sistem pengangkutan minimal mingguan, tetapi hingga tahun 2024 hal tersebut belum terlaksana. Mereka menilai bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan bersih belum terpenuhi secara menyeluruh. Keluhan masyarakat ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan pelayanan publik masih belum terwujud secara menyeluruh.

Anggota DPRD Morowali Utara menilai bahwa pemerataan dapat tercapai apabila terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya melalui penambahan armada, pembentukan unit pengelola sampah di desa, dan pembangunan TPS baru pada kecamatan nonlayanan. Ia juga menekankan pentingnya prioritas kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pusat kota, tetapi juga memperhatikan wilayah pinggiran dan pedesaan.

Meskipun terdapat ketimpangan distribusi layanan, terdapat pula aspek positif yang menunjukkan arah perbaikan. Pada 2024, pemerintah daerah menambah titik tong sampah portable di pusat kota, terutama di Jalan Poros Kolonodale, kawasan pelabuhan, dan area pasar. Penambahan sarana ini

meningkatkan akses masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, yang pada akhirnya mendukung pemerataan manfaat pada wilayah-wilayah padat aktivitas.

Selain itu, beberapa desa mulai menunjukkan inisiatif mandiri dalam penanganan sampah melalui pembuatan lubang komunal, pengumpulan sampah organik untuk pengomposan skala kecil, dan kegiatan pembersihan lingkungan secara berkala. Walaupun belum ideal, partisipasi ini menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat berupaya menutup kesenjangan layanan yang tidak tertangani oleh pemerintah daerah.

Dari perspektif peneliti, ketimpangan layanan antara dua kecamatan layanan dan delapan kecamatan nonlayanan menunjukkan bahwa pemerataan kebijakan masih rendah. Namun, peneliti juga menilai bahwa langkah awal yang sudah berjalan—perbaikan armada, penguatan jadwal layanan, penambahan sarana tong sampah, dan meningkatnya pengawasan lapangan—menjadi fondasi penting bagi upaya perluasan layanan pada tahun-tahun mendatang.

Data sekunder tahun 2024 memperkuat temuan penelitian. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (2024):

- Layanan pengangkutan hanya mencakup 20% kecamatan (2 dari 10 kecamatan).
- Armada aktif hanya 4 unit, seluruhnya beroperasi di Petasia dan Lembo.
- Hanya 1 kecamatan yang memiliki TPS berfungsi (Petasia).
- Cakupan layanan kebersihan wilayah perkotaan mencapai $\pm 67\%$,

namun cakupan wilayah pedesaan hanya $\pm 15\%$.

Angka-angka ini jelas menggambarkan bahwa pemerataan layanan kebersihan belum tercapai secara optimal. Peneliti menilai bahwa tanpa peningkatan sarana dan perluasan armada, penerapan pemerataan tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Namun demikian, pemerintah daerah menunjukkan komitmen awal melalui optimalisasi armada yang tersedia dan peningkatan sarana di pusat kota. Upaya ini merupakan langkah progresif meskipun masih bersifat terbatas.

Secara keseluruhan, pemerataan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 masih jauh dari ideal. Layanan hanya menjangkau sebagian wilayah, dan sebagian besar masyarakat mengelola sampah secara mandiri. Namun, peningkatan kapasitas operasional di dua kecamatan layanan, penambahan sarana portable, serta inisiatif masyarakat menunjukkan bahwa terdapat pondasi positif untuk memperbaiki pemerataan pada masa mendatang. Dengan penambahan armada, pembangunan TPS baru, dan pelibatan desa dalam manajemen sampah, kebijakan ini berpeluang semakin merata dalam beberapa tahun ke depan.

e. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas adalah dimensi penting dalam evaluasi kebijakan yang menunjukkan sejauh mana pelaksana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan, keluhan, harapan, dan perubahan situasi yang dihadapi masyarakat. Menurut Dunn (1994), responsivitas mencerminkan kesediaan pemerintah untuk mendengar suara masyarakat dan

menyesuaikan tindakan secara cepat. Dalam pengelolaan sampah, responsivitas dapat dilihat dari kecepatan menangani laporan sampah menumpuk, perubahan jadwal jika terjadi kondisi darurat, serta kesiapan pemerintah menindaklanjuti masukan masyarakat.

Dalam penelitian ini, responsivitas dimaknai sebagai kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara merespons kebutuhan kebersihan masyarakat sepanjang tahun 2024. Fokus penilaian tidak hanya pada penanganan teknis, tetapi juga pada kualitas komunikasi, kesiapan petugas, dan komitmen pemerintah dalam merespons persoalan yang muncul, terutama di dua kecamatan layanan.

Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah daerah cukup baik di wilayah layanan, terutama di Petasia yang merupakan pusat pemerintahan. Pemerintah merespons laporan masyarakat lebih cepat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Keluhan mengenai sampah menumpuk di jalan protokol, pasar, atau area perkantoran biasanya ditindaklanjuti pada hari yang sama atau keesokan harinya. Respons cepat ini menjadi salah satu capaian positif dalam tahun 2024.

Dalam penjelasannya, Kepala Dinas menyampaikan:

“Kami sekarang menerima laporan masyarakat bukan hanya melalui surat atau disposisi formal, tetapi juga lewat grup WhatsApp dan pesan langsung. Kalau ada titik sampah yang menumpuk, masyarakat tinggal kirim foto dan lokasi, dan biasanya langsung kami tindak lanjuti.” (Wawancara, 2025)

Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, peningkatan responsivitas dipengaruhi oleh pola komunikasi internal yang

lebih terorganisasi. Pengawas lapangan melakukan pengecekan rutin setiap pagi, dan hasil pemantauan langsung dilaporkan ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti. Sistem sederhana ini, meskipun tidak berbasis aplikasi, membantu mempercepat arus informasi sehingga masalah dapat ditangani lebih cepat.

Dalam pernyataannya, Kepala Bidang menyampaikan:

“Kalau dulu semua laporan harus lewat surat dan prosesnya agak panjang, sekarang masyarakat bisa langsung menghubungi kami lewat grup WA atau nomor petugas. Dengan begitu, aduan bisa kami respon lebih cepat.”
(Wawancara, 2025)

Petugas lapangan juga menyampaikan bahwa mereka semakin sering menerima instruksi untuk segera menangani titik-titik tertentu ketika ada laporan dari masyarakat atau ketika terjadi lonjakan timbulan sampah, terutama di pusat aktivitas seperti pasar dan jalan raya. Petugas merasa bahwa koordinasi tahun 2024 jauh lebih efektif dibanding sebelumnya. Respons cepat ini juga memperbaiki citra pelayanan kebersihan di mata masyarakat.

Masyarakat di Kelurahan Kolonodale mengakui adanya peningkatan kecepatan respons petugas dalam menangani masalah sampah. Mereka memberi contoh bahwa ketika tong sampah penuh atau terjadi tumpukan sampah di pasar, petugas biasanya datang dalam 1–2 jam setelah laporan disampaikan kepada lurah atau melalui grup WhatsApp lingkungan. Ini menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah di wilayah layanan sudah mulai terbentuk dan dirasakan masyarakat.

Namun, responsivitas ini tidak dapat dirasakan oleh masyarakat di

delapan kecamatan nonlayanan. Karena tidak ada armada dan petugas yang bertugas secara khusus, laporan masyarakat mengenai sampah tidak bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat akhirnya harus mengatasi sendiri, bahkan beberapa keluhan tidak pernah mendapatkan respons karena memang tidak ada sistem layanan yang tersedia. Ini menunjukkan ketimpangan responsivitas yang signifikan antarwilayah.

Anggota DPRD Morowali Utara menilai bahwa responsivitas pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan jangkauan armada. Dengan hanya empat unit kendaraan yang aktif, sangat sulit bagi pemerintah untuk merespons keluhan di wilayah yang jauh dari pusat kota. Ia menilai bahwa meskipun respons di pusat kota meningkat, responsivitas kabupaten secara keseluruhan masih rendah karena sebagian besar masyarakat tidak mendapat akses layanan.

Hal tersebut ia pertegas melalui pernyataan berikut:

“Yang menjadi catatan kami di DPRD adalah respons cepat ini masih terjadi di daerah layanan saja. Untuk kecamatan yang belum masuk rute armada, laporan masyarakat seringkali tidak bisa ditindaklanjuti, bukan karena tidak mau, tetapi karena fasilitasnya belum ada.” (Wawancara, 2025)

Di sisi internal, pemerintah daerah sebenarnya menunjukkan upaya positif dalam meningkatkan responsivitas. Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup mulai menerapkan pola pelaporan berbasis formulir harian yang mewajibkan petugas mencatat kondisi lapangan. Laporan ini membantu mengidentifikasi titik-titik baru yang memerlukan perhatian, seperti area yang muncul tumpukan secara tiba-tiba setelah aktivitas pasar.

Walau sistem ini sederhana, keberadaannya meningkatkan respons pemerintah terhadap dinamika lapangan.

Selain itu, beberapa desa melakukan inisiatif swadaya dengan mengatur jadwal gotong royong mingguan. Meskipun ini bukan bagian langsung dari respons pemerintah kabupaten, inisiatif tersebut menunjukkan bahwa responsivitas masyarakat terhadap kondisi lingkungannya meningkat karena minimnya dukungan layanan formal. Hal ini menunjukkan adanya respons sosial yang terbentuk akibat keterbatasan layanan pemerintah.

Data sekunder tahun 2024 memperlihatkan pola responsivitas yang cukup menarik. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2024:

- 90% laporan masyarakat di Kecamatan Petasia ditindaklanjuti dalam ≤ 24 jam
- 76% laporan di Kecamatan Lembo ditindaklanjuti dalam ≤ 48 jam,
- Tidak ada data respons di delapan kecamatan lainnya karena layanan tidak tersedia,
- Jumlah laporan yang masuk meningkat 22% dibanding tahun 2023, menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

Data ini membuktikan bahwa responsivitas di dua kecamatan layanan sudah meningkat, namun masih nol di wilayah lainnya karena keterbatasan fasilitas.

Peneliti menilai bahwa responsivitas pemerintah masih bersifat lokal dan terbatas, namun menunjukkan arah perubahan positif. Pemerintah

responsif di wilayah yang mereka mampu tangani, tetapi tidak dapat berbuat banyak pada wilayah tanpa armada dan petugas. Respons cepat di dua kecamatan layanan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan, tetapi pemerataan responsivitas masih menjadi tantangan utama ke depan.

Secara keseluruhan, responsivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 meningkat di wilayah layanan tetapi masih rendah pada tingkat kabupaten. Pemerintah telah menunjukkan perbaikan melalui penguatan pengawasan lapangan, percepatan tindak lanjut laporan, dan peningkatan koordinasi internal. Namun, tanpa perluasan armada dan penempatan petugas kebersihan di kecamatan lain, responsivitas tidak dapat dirasakan secara merata. Dengan penguatan kapasitas sarana serta sistem pelaporan yang lebih modern, responsivitas daerah ini berpotensi meningkat secara menyeluruh.

f. Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan atau *appropriateness* adalah salah satu dimensi evaluasi kebijakan yang menilai sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, relevan dengan kondisi lapangan, dan tepat dalam memilih instrumen yang digunakan. Menurut Dunn (1994), ketepatan tidak hanya berkaitan dengan apakah suatu kebijakan benar secara normatif, tetapi juga apakah kebijakan tersebut benar dalam konteks sosial, geografis, dan operasional. Artinya, suatu kebijakan dapat saja baik di atas kertas, tetapi tidak tepat ketika dihadapkan pada kondisi nyata di lapangan. Dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah, ketepatan juga

mengukur kesesuaian strategi, prosedur, dan sarana dengan karakteristik wilayah, kapasitas pemerintah, serta pola perilaku masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, ketepatan dianalisis dengan melihat kesesuaian kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Morowali Utara dengan kebutuhan masyarakat pada tahun 2024. Penilaian meliputi apakah langkah-langkah implementasi sesuai dengan kondisi riil daerah, terutama terkait ketersediaan sarana-prasarana, kapasitas anggaran, persebaran penduduk, tingkat timbulan sampah, serta kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Dengan kata lain, ketepatan dilihat dari sejauh mana kebijakan itu benar-benar menjawab permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 sebenarnya cukup tepat secara konsep. Regulasi tersebut sudah mencakup pengangkutan, pemilahan, penyimpanan, dan pembuangan akhir sampah, yang secara normatif selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyampiannya, beliau menyatakan:

“Kebijakan yang berjalan sekarang masih banyak mengadopsi pola pengelolaan sampah perkotaan. Sementara kondisi wilayah kita berbeda, ada desa yang rumahnya berjauhan dan tidak bisa dijangkau armada. Jadi model ini belum sepenuhnya tepat kalau diterapkan sama di semua kecamatan.” (Wawancara, 2025)

Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut belum tepat secara operasional karena kapasitas pemerintah daerah masih terbatas. Perda mengatur pengangkutan sampah untuk seluruh wilayah kabupaten, tetapi

pada praktiknya hanya dua kecamatan yang mendapat layanan.

Ketidaktepatan ini tidak terjadi karena kesalahan perencanaan semata, tetapi lebih disebabkan oleh minimnya sarana pendukung. Dengan hanya empat unit armada aktif pada tahun 2024, mustahil kebijakan tersebut dijalankan sesuai skala kebutuhan kabupaten yang memiliki sepuluh kecamatan dengan jarak geografis yang jauh. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas pelaksana di lapangan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan menegaskan bahwa ketepatan kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama topografi wilayah.

Ia menyampaikan:

“Kalau kita lihat secara keseluruhan, kebijakan yang ada sekarang masih lebih cocok untuk wilayah perkotaan. Untuk wilayah yang penduduknya tersebar dan akses jalannya belum merata, sistem ini belum sepenuhnya tepat karena pelayanan pengangkutan tidak bisa dilakukan secara rutin.”
(Wawancara, 2024)

Kabupaten Morowali Utara memiliki karakteristik wilayah yang tersebar, banyak desa berada jauh dari pusat kota, dan akses jalan ke beberapa kecamatan masih rusak. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang menitikberatkan pada pengangkutan sampah setiap hari tidak sepenuhnya tepat untuk wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak mempertimbangkan keragaman karakteristik wilayah secara proporsional.

Petugas kebersihan lapangan memberikan perspektif operasional bahwa kebijakan pengangkutan sampah dua kali sehari—yang saat ini dijalankan di Kecamatan Petasia—sudah tepat untuk wilayah padat

penduduk dan pusat aktivitas ekonomi. Hasilnya terlihat dari berkurangnya tumpukan sampah di area pasar dan jalan raya. Namun, mereka juga mengakui bahwa kebijakan yang sama tidak akan tepat jika diimplementasikan di desa dengan jarak antarpermukiman yang jauh, jumlah penduduk sedikit, dan timbunan sampah rendah. Ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perlu dibedakan berdasarkan karakteristik wilayah, bukan satu kebijakan untuk semua kecamatan.

Masyarakat di Kelurahan Kolonodale dan Bahoue mengakui bahwa kebijakan menyediakan tong sampah portable pada 2024 merupakan langkah tepat karena mendukung kebiasaan masyarakat kota yang cenderung membuang sampah pada tempat yang disediakan. Namun masyarakat juga menilai bahwa penempatannya masih belum tepat karena beberapa titik permukiman padat tidak memiliki sarana tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebijakan mengarah ke ketepatan, tetapi belum menyentuh seluruh kebutuhan.

Di sisi lain, masyarakat di kecamatan nonlayanan seperti Petasia Timur, Mori Atas, dan Mori Utara merasa bahwa kebijakan yang ada tidak tepat bagi mereka. Karena tidak memiliki akses ke layanan pengangkutan, kebijakan yang berfokus pada pengangkutan sampah tidak relevan dengan kebutuhan pedesaan. Mereka lebih membutuhkan kebijakan yang tepat dengan realitas mereka, seperti fasilitas pembakaran ramah lingkungan, TPS desa yang sederhana, pelatihan pemilahan, dan pengelolaan berbasis komunitas. Ini menegaskan bahwa ketepatan kebijakan sangat bergantung pada konteks wilayah.

Anggota DPRD Morowali Utara yang diwawancarai menilai bahwa kebijakan belum tepat karena terlalu berorientasi pada kota.

Dalam pernyataannya, ia menjelaskan:

“Secara konsep kebijakan ini sudah baik dan sejalan dengan kebutuhan daerah. Tapi kalau kita bicara ketepatan penerapannya, masih belum sesuai dengan karakter wilayah karena ada kecamatan yang bisa dijangkau armada dan ada yang tidak.” (Wawancara, 2024)

Ia menyatakan bahwa seharusnya pemerintah menyusun strategi berbeda untuk desa terpencil, termasuk membentuk satuan tugas kebersihan desa atau menyediakan alat pengolahan sederhana. Tanpa diferensiasi kebijakan, ketepatan tidak akan tercapai secara menyeluruh. Penilaian ini memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan perlu disesuaikan agar tepat sasaran.

Namun demikian, terdapat sejumlah langkah pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai tepat sasaran. Perbaikan armada yang sebelumnya rusak hingga beroperasi kembali pada tahun 2024 merupakan keputusan yang tepat karena meningkatkan kapasitas operasional tanpa mengeluarkan biaya besar untuk pembelian unit baru. Selain itu, kebijakan memperbaiki rute pengangkutan sehingga armada tidak lagi berjalan tanpa muatan juga merupakan langkah yang tepat dalam konteks efisiensi dan efektivitas.

Penerapan supervisi lapangan setiap pagi di Petasia juga merupakan kebijakan yang tepat karena menutup celah keterlambatan jadwal dan meningkatkan disiplin petugas. Langkah ini menghasilkan respons cepat ketika terjadi penumpukan sampah mendadak. Dengan meningkatnya

pengawasan, kualitas layanan kebersihan pun meningkat meskipun sumber daya terbatas.

Kebijakan pemerintah daerah untuk menempatkan tong sampah portable di titik-titik strategis pada tahun 2024 juga merupakan langkah tepat. Penempatan tong di area pelabuhan, pasar raya, dan jalan protokol terbukti mengurangi sampah berserakan di jalur umum. Masyarakat pun menilai kebijakan ini membantu mereka membuang sampah dengan lebih teratur. Langkah ini menunjukkan contoh kebijakan yang kecil tetapi tepat sasaran.

Data sekunder pada tahun 2024 memperkuat analisis ketepatan ini. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2024:

- Pengurangan titik tumpukan sampah dari 14 titik menjadi 9 titik menunjukkan bahwa kebijakan di pusat kota cukup tepat.
- Ritase harian meningkat meski armada aktif tetap 4 unit, menandakan ketepatan strategi rute.
- Namun 8 kecamatan tidak tersentuh layanan sama sekali, menunjukkan ketidaktepatan kebijakan dalam cakupan kabupaten.
- Hanya 1 kecamatan yang memiliki TPS sesuai standar, menandakan ketidaknyataan kebijakan dalam menyediakan fasilitas.

Data ini menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan terbatas pada wilayah dengan sarana memadai, bukan keseluruhan wilayah kabupaten. Peneliti menilai bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 tergolong tepat secara konsep, tetapi

tidak tepat secara implementasi menyeluruh. Kebijakan tersebut tepat untuk wilayah perkotaan, tetapi tidak adaptif untuk wilayah pedesaan. Dengan karakteristik wilayah yang beragam, kebijakan memerlukan penyesuaian berbasis kebutuhan wilayah (kota vs desa). Tanpa diferensiasi strategi, ketepatan kebijakan hanya akan tercapai sebagian.

Secara keseluruhan, ketepatan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara masih berada pada kategori tepat secara parsial. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah tepat pada wilayah layanan, tetapi belum menerapkan kebijakan yang relevan dan realistis bagi wilayah lainnya. Dengan memperkuat pendekatan berbasis lokal, meningkatkan keberpihakan anggaran, serta menambahkan fasilitas sederhana seperti TPS desa, ketepatan kebijakan ini dapat meningkat pada masa mendatang. Kebijakan yang tepat harus sesuai dengan kondisi masyarakat, dan hal inilah yang menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Dari semua pembahasan hal tersebut diatas, peneliti coba buat dalam sebuah table triangulasi sebagai berikut :

Fokus Temuan	Wawancara	Observasi Lapangan	Dokumen Resmi	Hasil Triangulasi
Ketersediaan Armada Pengangkut	Informan (DLH dan petugas lapangan)	Peneliti melihat langsung	Laporan operasional dan data sarpras	Data konsisten. Kapasitas

Fokus Temuan	Wawancara	Observasi Lapangan	Dokumen Resmi	Hasil Triangulasi
	menyatakan jumlah armada aktif hanya 4 unit dan belum mencukupi cakupan wilayah.	kondisi armada yang beroperasi dan mencatat waktu ritase harian yang terbatas.	DLH menunjukkan jumlah armada aktif sesuai wawancara , yakni 4 unit .	pengangkutan terbatas dan menjadi kendala utama layanan persampahan.
Luas Cakupan Layanan	Informan menyampaikan bahwa layanan hanya menjangkau Kecamatan Petasia dan Lembo .	Peneliti menemukan tidak adanya aktivitas pengangkutan pada kecamatan lain.	Tidak ada dokumen yang menunjukkan perluasan layanan ke 8 kecamatan lainnya.	Data konsisten. Cakupan layanan masih sangat terbatas.
Volume Timbulan Sampah	Informan menyebut volume meningkat tetapi tidak ada	Di lapangan terlihat tumpukan sampah cukup tinggi di area	Data estimasi timbulan dari DLH dan BPS menunjukkan rata-rata ±72,6	Data relevan dan saling mendukung. Belum ada sistem

Fokus Temuan	Wawancara	Observasi Lapangan	Dokumen Resmi	Hasil Triangulasi
	pemantauan rutin berbasis timbulan.	pasar dan wilayah padat penduduk.	ton/hari.	monitoring berbasis data real-time.
Ketersediaan TPS	Informan DLH menyatakan hanya terdapat 1 TPS aktif.	Pengamatan lapangan menunjukkan TPS tunggal menjadi pusat drop-off sebelum pengangkutan.	Dokumen aset daerah mengkonfirmasi keberadaan satu TPS aktif.	Data selaras. Fasilitas TPS belum memadai.
SDM Pengelola	Petugas lapangan dan pejabat DLH menyampaikan jumlah SDM sebanyak 22 orang dan belum memenuhi	Peneliti menyaksikan beban kerja berat dan keterbatasan petugas dalam penanganan sampah.	Dokumen daftar pegawai dan RKA DLH mencatat jumlah yang sama.	Data kuat dan konsisten. SDM tidak memadai dibanding beban kerja.

Fokus Temuan	Wawancara	Observasi Lapangan	Dokumen Resmi	Hasil Triangulasi
	standar pelayanan.			
Perilaku dan Partisipasi Masyarakat	Informan menyatakan sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan belum memilah sampah.	Peneliti menemukan lokasi pembuangan terbuka dan pembakaran sampah mandiri di beberapa desa.	Tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya bank sampah aktif atau program edukasi berkelanjutan.	Data konsisten. Partisipasi masyarakat masih rendah.
Implementasi Kebijakan	Informan dari DPRD dan DLH menyatakan Perda belum berjalan optimal dan	Tidak ditemukan SOP operasional pelaksanaan di lapangan.	Perda Nomor 5 Tahun 2016 tersedia, tetapi tidak ditemukan Perbup atau Juknis sebagai pendukung	Data cocok. Implementasi kebijakan masih terkendala aturan teknis dan

Fokus Temuan	Wawancara	Observasi Lapangan	Dokumen Resmi	Hasil Triangulasi
	belum memiliki SOP teknis sebagai turunan.		operasional.	operasional.

Tabel 4.5

Triangulasi Data

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bab ini merangkum seluruh temuan penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara berdasarkan analisis enam dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural, teknis, dan operasional. Namun demikian, terdapat pula sejumlah capaian positif yang menandai adanya perbaikan bertahap dalam pelaksanaan kebijakan khususnya selama tahun 2024. Secara umum, keseluruhan temuan memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berada pada fase transisi dari pola kerja sederhana menuju pola pengelolaan yang lebih sistematis, meskipun belum merata di seluruh wilayah kabupaten.

Dari sisi efisiensi, kebijakan menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, terutama setelah pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan armada yang tersedia. Meskipun hanya empat unit yang aktif pada tahun 2024, peningkatan ritase harian, pengaturan ulang rute, serta optimalisasi jadwal kerja membuat biaya operasional dapat ditekan dan hasil layanan meningkat. Efisiensi juga didorong oleh perbaikan armada serta penambahan tong sampah portable di area strategis.

Efektivitas kebijakan juga menunjukkan peningkatan khususnya di wilayah layanan (Petasia dan Lembo). Volume sampah yang terangkut meningkat,

konsistensi jadwal pengangkutan lebih baik, dan titik penumpukan sampah menurun dari 14 titik menjadi 9 titik. Namun demikian, efektivitas secara kabupaten tidak dapat dikatakan tinggi karena delapan kecamatan lainnya tidak menerima layanan pengangkutan, sehingga penanganan sampah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Dari sisi kecukupan, kebijakan masih menghadapi tantangan besar. Sarana-prasarana belum memadai, hanya satu kecamatan memiliki TPS berfungsi, jumlah petugas kebersihan belum proporsional, dan armada sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan kapasitas kebijakan jauh di bawah skala permasalahan, sehingga kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun demikian, beberapa inisiatif swadaya masyarakat dan perbaikan armada menunjukkan arah perbaikan kecukupan.

Dimensi pemerataan menunjukkan ketimpangan pelayanan yang signifikan. Layanan hanya menjangkau dua kecamatan, sementara mayoritas wilayah tidak tersentuh layanan kebersihan formal. Perbedaan spasial ini menyebabkan ketidakmerataan manfaat kebijakan, baik dari sisi akses pengangkutan maupun ketersediaan sarana. Namun, upaya pemerintah menambah fasilitas portable dan meningkatkan pengawasan lapangan menunjukkan ada langkah awal menuju pemerataan, meskipun masih sangat terbatas.

Responsivitas pemerintah daerah terhadap laporan masyarakat di wilayah layanan menunjukkan peningkatan nyata. Laporan masyarakat biasanya ditindaklanjuti dalam waktu 24–48 jam, terutama di Kelurahan Kolonodale dan sekitarnya. Koordinasi internal dan pengawasan lapangan yang lebih terstruktur berkontribusi pada respons cepat ini. Akan tetapi, responsivitas

hanya berlaku bagi dua kecamatan layanan, sementara masyarakat di wilayah lain tidak memiliki akses pelaporan karena tidak ada layanan yang tersedia.

Dimensi ketepatan kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan cukup tepat secara konsep, namun tidak tepat secara implementatif pada skala kabupaten. Kebijakan berbasis pengangkutan sampah cocok diterapkan di wilayah perkotaan, tetapi tidak relevan bagi wilayah pedesaan yang tidak memiliki akses layanan. Sebaliknya, kebijakan justru memerlukan diferensiasi strategi agar tepat dengan kondisi geografis, kapasitas, dan perilaku masyarakat desa.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara masih berada pada kategori “cukup berhasil secara lokal, namun belum efektif secara kabupaten”. Pelayanan yang berjalan di wilayah Petasia dan Lembo menunjukkan perbaikan, tetapi belum menjadi standar bagi seluruh kecamatan. Keterbatasan armada, minimnya TPS, keterbatasan anggaran, dan luasnya wilayah menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah saran diberikan untuk memperbaiki implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara. Saran ini disusun berdasarkan analisis operasional dan kebutuhan jangka panjang, sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.

Pertama, pemerintah perlu menambah armada pengangkutan sampah secara bertahap agar layanan dapat diperluas ke kecamatan lain. Dengan hanya empat

armada aktif pada tahun 2024, layanan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah. Penambahan armada kecil (pick-up, motor sampah) sangat penting untuk menjangkau desa yang berlokasi jauh atau sulit dilalui.

Kedua, perlu dilakukan pembangunan TPS desa atau TPS kecamatan yang memadai dan sesuai standar teknis. Keberadaan TPS sangat penting sebagai fasilitas penampungan sebelum sampah diangkut ke lokasi pembuangan akhir. TPS sederhana dengan konsep terkontrol dapat menjadi solusi awal yang realistis untuk kecamatan nonlayanan.

Ketiga, pemerintah perlu menyusun kebijakan berbasis wilayah (area-based policy). Wilayah kota membutuhkan strategi pengangkutan intensif, sementara wilayah pedesaan memerlukan strategi berbeda seperti pengomposan desa, bank sampah, atau fasilitas pembakaran ramah lingkungan. Dengan pendekatan berbasis konteks, ketepatan dan efektivitas kebijakan dapat meningkat signifikan.

Keempat, perlu dilakukan peningkatan kapasitas petugas kebersihan melalui pelatihan teknis, penggunaan alat keselamatan, serta manajemen tugas yang terstruktur. Penambahan jumlah petugas juga diperlukan mengingat rasio petugas saat ini masih terlalu rendah.

Kelima, pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi dan partisipasi masyarakat, terutama di kecamatan nonlayanan. Program rutin seperti gotong royong, sosialisasi pemilahan, dan pembinaan desa bersih dapat menjadi langkah awal peningkatan kualitas lingkungan masyarakat.

Keenam, perlu dikembangkan sistem pelaporan berbasis digital sederhana, seperti WhatsApp Center atau aplikasi internal untuk mempercepat respons

pemerintah. Sistem ini bisa meningkatkan transparansi dan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Ketujuh, pemerintah perlu menyusun roadmap pengelolaan sampah kabupaten 5–10 tahun untuk memastikan arah pembangunan jelas dan terukur, termasuk target penambahan armada, pembangunan TPS, dan peningkatan cakupan layanan.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten dan terukur, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, partisipatif, dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan dalam reformasi kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan visi daerah “*Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.*”

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Crown, D. (2004). *Public Management and Strategy*. London: Routledge.

Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis*. New Jersey: Pearson.

Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Parsons, W. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. California: Sage Publications.

2. Dokumen Resmi Pemerintah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara. (2023). *Kabupaten Morowali Utara dalam Angka 2023*. Kolonodale: BPS.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah*. Kolonodale.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka*

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara. Kolonodale.

3. Jurnal, Penelitian, dan Sumber Ilmiah

Amanda. (2016). Evaluasi Kebijakan Publik: Faktor Penyebab Kegagalan.

Jurnal Ilmu Administrasi.

Azizah, dkk. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA

Talumelito, Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik dan Lingkungan.*

Cahya Murni & Silam. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota

Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Negara.*

Hardiyanti, dkk. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA

Kalikondang, Kabupaten Demak. *Jurnal Kebijakan Publik.*

Lestari, T. & Utomo. (2025). Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

(TPS Pasar Simpang Baru Panam). *Jurnal Administrasi Publik.*

Lampiran I

Pedoman Wawancara

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Efektivitas	Pencapaian tujuan kebijakan dan realisasi program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana capaian pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2016 dalam pengelolaan sampah? 2. Apakah volume sampah berkurang setelah kebijakan ini dijalankan? 3. Bagaimana efektivitas program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat?
Efisiensi	Pemanfaatan anggaran dan sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anggaran yang dialokasikan sudah digunakan secara optimal? 2. Bagaimana kondisi dan pemanfaatan armada pengangkut serta TPS/TPA di lapangan? 3. Apakah sistem pengelolaan anggaran sudah efisien dan tepat sasaran?
Kecukupan	Ketersediaan fasilitas dan jangkauan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah cukup mendukung kebutuhan layanan persampahan?

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
		<p>2. Bagaimana cakupan pelayanan ke seluruh kecamatan?</p> <p>3. Apakah jumlah tenaga lapangan sudah memadai?</p>
Pemerataan	Akses layanan di seluruh wilayah	<p>1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan pelayanan di daerah terpencil?</p> <p>2. Apakah ada wilayah yang belum terjangkau layanan persampahan?</p> <p>3. Bagaimana strategi pemerataan sarana antar-kecamatan?</p>
Responsivitas	Tanggapan terhadap keluhan dan adaptasi kebijakan	<p>1. Bagaimana DLH menanggapi laporan atau pengaduan masyarakat terkait sampah?</p> <p>2. Apakah kebijakan persampahan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial dan lingkungan?</p> <p>3. Apakah masyarakat dilibatkan dalam evaluasi kebijakan?</p>
Ketepatan	Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan	<p>1. Apakah substansi Perda No. 5 Tahun 2016 masih relevan?</p>

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
	daerah	<p>2. Apakah kebijakan saat ini sudah tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan sampah?</p> <p>3. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk peningkatan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan?</p>

Anggota DPRD

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Efektivitas	Fungsi legislasi dan pengawasan kebijakan	<p>1. Bagaimana peran DPRD dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2016?</p> <p>2. Apakah kebijakan tersebut efektif mengatasi persoalan sampah di daerah?</p> <p>3. Apakah DPRD melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi</p>

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
		perda?
Efisiensi	Dukungan anggaran dan penggunaan sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana DPRD menilai efisiensi alokasi APBD untuk pengelolaan sampah? 2. Apakah program yang dibiayai sudah memberikan hasil sesuai harapan? 3. Apakah masih ada pemborosan atau tumpang tindih anggaran?
Kecukupan	Dukungan kebijakan dan sumber daya hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dukungan regulasi dan dana sudah cukup untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sampah? 2. Apakah DPRD merencanakan penguatan regulasi atau perda baru? 3. Bagaimana keterlibatan DPRD dalam pengawasan penggunaan fasilitas?
Pemerataan	Keadilan dan kesetaraan akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan ini telah menjamin pemerataan pelayanan di seluruh kecamatan? 2. Bagaimana pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik terkait kebersihan?

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
		3. Apakah kelompok masyarakat pinggiran sudah mendapatkan pelayanan yang layak?
Responsivitas	Penyerapan aspirasi dan fungsi representatif	1. Bagaimana DPRD menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait sampah? 2. Apakah kebijakan yang diterapkan sudah cukup responsif terhadap aspirasi warga? 3. Bagaimana komunikasi antara DPRD dan DLH dalam merespons isu lingkungan?
Ketepatan	Relevansi dan arah kebijakan daerah	1. Apakah kebijakan ini sudah tepat dalam konteks pembangunan berkelanjutan? 2. Apakah ada rencana revisi atau inovasi kebijakan ke depan? 3. Menurut Bapak/Ibu, strategi apa yang paling tepat untuk memastikan keberlanjutan kebijakan persampahan di Morowali Utara?

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Efektivitas	Pelaksanaan dan hasil di tingkat kecamatan	1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Anda? 2. Apakah layanan kebersihan berjalan sesuai target? 3. Bagaimana efektivitas koordinasi dengan DLH dan desa?
Efisiensi	Penggunaan tenaga, armada, dan waktu kerja	1. Apakah tenaga dan armada kebersihan mencukupi? 2. Bagaimana tingkat efisiensi dalam pengangkutan sampah? 3. Apakah ada kendala anggaran di tingkat kecamatan?
Kecukupan	Pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat	1. Apakah fasilitas persampahan di kecamatan Anda sudah memadai? 2. Apakah masyarakat terlayani secara menyeluruh? 3. Apa langkah yang dilakukan jika pelayanan belum mencukupi?
Pemerataan	Distribusi layanan di seluruh desa	1. Apakah seluruh desa di kecamatan Anda mendapatkan layanan yang

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
		<p>sama?</p> <p>2. Apakah ada wilayah prioritas atau yang tertinggal?</p> <p>3. Bagaimana upaya memastikan pemerataan pelayanan?</p>
Responsivitas	Penanganan keluhan dan partisipasi publik	<p>1. Bagaimana respon pemerintah kecamatan terhadap keluhan warga terkait sampah?</p> <p>2. Apakah masyarakat ikut serta dalam kegiatan kebersihan?</p> <p>3. Bagaimana strategi meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga?</p>
Ketepatan	Keselarasan kebijakan dengan kondisi wilayah	<p>1. Apakah kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan sesuai dengan karakteristik wilayah Anda?</p> <p>2. Apakah ada inovasi lokal yang dikembangkan di kecamatan?</p> <p>3. Apa rekomendasi Anda untuk kebijakan pengelolaan sampah di masa depan?</p>

Masyarakat

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Efektivitas	Dampak kebijakan terhadap kebersihan lingkungan	<p>1. Apakah kondisi kebersihan di lingkungan Anda membaik setelah adanya kebijakan pengelolaan sampah?</p> <p>2. Apakah masyarakat mengetahui adanya Perda No. 5 Tahun 2016?</p> <p>3. Seberapa besar dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari Anda?</p>
Efisiensi	Kinerja layanan dan kemudahan akses	<p>1. Apakah petugas kebersihan bekerja secara rutin dan tepat waktu?</p> <p>2. Bagaimana kualitas pelayanan pengangkutan sampah di lingkungan Anda?</p> <p>3. Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan?</p>
Kecukupan	Ketersediaan fasilitas dan layanan publik	<p>1. Apakah tempat sampah dan TPS tersedia di sekitar lingkungan Anda?</p> <p>2. Apakah pengangkutan dilakukan</p>

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
		secara teratur? 3. Apa kendala utama yang Anda rasakan dalam layanan kebersihan?
Pemerataan	Keadilan layanan dan akses masyarakat	1. Apakah semua warga di lingkungan Anda mendapatkan pelayanan yang sama? 2. Apakah ada wilayah yang kurang diperhatikan oleh petugas? 3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan retribusi sampah?
Responsivitas	Peran masyarakat dan respon pemerintah	1. Bagaimana pemerintah menanggapi keluhan warga tentang sampah menumpuk? 2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam kegiatan kebersihan atau bank sampah? 3. Apa bentuk partisipasi masyarakat yang paling efektif menurut Anda?
Ketepatan	Persepsi terhadap relevansi kebijakan	1. Apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah sesuai dengan kondisi

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
		<p>masyarakat?</p> <p>2. Menurut Anda, apa langkah terbaik agar pengelolaan sampah lebih berhasil?</p> <p>3. Apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan?</p>

Lampiran II

TRANSKIP WAWANCARA

Informan: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Morowali Utara

Lokasi : Kantor DLH Kabupaten Morowali Utara

Tanggal : (30 Oktober 2025)

A. Dimensi Efektivitas

- **Peneliti:**

Bagaimana capaian pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2016 dalam pengelolaan sampah?

- **Informan:**

Secara normatif, Perda No. 5 Tahun 2016 sudah menjadi dasar kerja kami dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara. Semua program yang kami jalankan, mulai dari pengangkutan, penempatan TPS, sampai penegakan disiplin kebersihan, merujuk pada perda tersebut. Namun, kalau berbicara capaian di lapangan, saya harus jujur menyampaikan bahwa implementasinya belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan perda masih sangat terpusat di wilayah perkotaan, khususnya Kecamatan Petasia dan Lembo, sementara delapan kecamatan lainnya belum tersentuh layanan pengangkutan secara reguler. Jadi, bisa dikatakan perda ini sudah berjalan, tetapi baru berdampak nyata di sebagian kecil wilayah kabupaten, belum menyeluruh sebagaimana harapan awal pembentukannya.

- **Peneliti:**

Apakah volume sampah berkurang setelah kebijakan ini dijalankan?

- **Informan:**

Kalau kita lihat khusus di wilayah layanan, terutama di Kolonodale dan sekitarnya, ada penurunan volume tumpukan sampah yang cukup terasa. Sebelum penataan ritase dan rute, titik penumpukan sampah di kawasan pasar dan jalan utama bisa mencapai 14 titik, dan berdasarkan pemantauan kami di 2024, itu berkurang menjadi sekitar 9 titik. Artinya, ada perbaikan dari sisi pengelolaan di area yang kami layani. Namun bila ditarik ke level kabupaten, kami tidak bisa mengatakan bahwa volume sampah secara keseluruhan berkurang, karena di delapan kecamatan nonlayanan masyarakat tetap memproduksi sampah dengan pola pengelolaan mandiri seperti dibakar, ditimbun, atau dibuang ke lahan terbuka. Jadi, penurunan lebih terasa sebagai penurunan “tumpukan terlihat” di wilayah kota, bukan penurunan timbulan sampah secara sistemik di seluruh daerah.

- **Peneliti:**

Bagaimana efektivitas program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat?

- **Informan:**

Secara program, kami sudah melakukan berbagai bentuk edukasi, misalnya melalui sosialisasi di sekolah, pertemuan RT/RW, dan kegiatan-kegiatan hari lingkungan hidup. Pesan yang kami tekankan biasanya terkait pemilahan sampah, jadwal pembuangan, dan

pentingnya tidak membuang sampah di sungai. Namun, jangkauan sosialisasi ini masih terbatas dan belum dilakukan secara rutin di semua kecamatan. Efeknya, di wilayah tertentu, terutama di pusat kota, terlihat ada peningkatan kepatuhan membuang sampah di TPS dan di jam yang ditentukan. Tetapi di banyak desa, masyarakat masih menganggap sampah sebagai urusan rumah tangga masing-masing. Jadi, bisa saya katakan, edukasi sudah ada dan memberi dampak, tetapi belum efektif dalam mengubah perilaku masyarakat secara luas karena keterbatasan tenaga, anggaran, dan media komunikasi yang kami miliki.

B. Dimensi Efisiensi

- Peneliti:

Apakah anggaran yang dialokasikan sudah digunakan secara optimal?

- Informan:

Anggaran yang tersedia untuk urusan persampahan kami kelola seoptimal mungkin, karena kami sadar jumlahnya memang relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan ideal di lapangan. Porsi terbesar anggaran terserap untuk operasional, terutama BBM armada, biaya perawatan kendaraan, honor petugas kebersihan, dan pengadaan sarana kecil seperti tong sampah portable. Kami selalu berusaha menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan anggaran, misalnya dengan mengatur ritase agar BBM tidak boros tetapi titik layanan tetap terjangkau. Jadi kalau ditanya apakah anggaran digunakan optimal, saya bisa katakan iya dalam konteks keterbatasan yang ada. Tetapi kalau pertanyaannya

apakah anggarannya cukup untuk mencapai standar pelayanan minimal di seluruh kabupaten, jawabannya masih jauh dari cukup.

- **Peneliti:**

Bagaimana kondisi dan pemanfaatan armada pengangkut serta TPS/TPA di lapangan?

- **Informan:**

Kondisi armada memang menjadi salah satu tantangan besar kami. Secara jumlah, armada yang tercatat ada lebih dari empat, tetapi yang benar-benar aktif dan layak beroperasi secara rutin itu hanya empat unit sepanjang 2024. Beberapa kendaraan lain sering mengalami kerusakan sehingga tidak bisa diandalkan untuk pelayanan harian. Karena itu, kami terpaksa menyusun rute dan jadwal yang sangat padat untuk memaksimalkan empat armada ini. Terkait TPS, saat ini hanya satu TPS yang berfungsi dengan baik, yaitu di wilayah Petasia. Di kecamatan lain, belum ada TPS yang standar, sehingga armada praktis hanya berputar di area kota. Sementara TPA yang ada juga fasilitasnya masih terbatas, belum menggunakan teknologi pengolahan yang ideal. Kondisi ini membuat kami bekerja dalam skema “damage control”, artinya lebih banyak mencegah penumpukan di kota daripada benar-benar mengelola sampah secara tuntas.

- **Peneliti:**

Apakah sistem pengelolaan anggaran sudah efisien dan tepat sasaran?

- **Informan:**

Kami berusaha menjaga agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk

kebersihan digunakan pada pos-pos yang langsung berdampak pada pelayanan. Misalnya, jika ada pilihan antara kegiatan seremonial dan perbaikan kendaraan, kami cenderung memilih perbaikan kendaraan karena langsung menunjang kinerja pengangkutan sampah. Namun, efisiensi ini tetap terbatas pada kecilnya porsi anggaran. Jadi, dari sisi manajemen internal, saya menilai sistem sudah cukup efisien dan tepat sasaran, tetapi karena basis anggarannya kecil, skalanya masih belum mampu menjawab seluruh kebutuhan daerah. Efisiensi di sini lebih bermakna “hemat dan fokus”, bukan “besar dan menjangkau semua”.

C. Dimensi Kecukupan

- Peneliti:

Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah cukup mendukung kebutuhan layanan persampahan?

- Informan:

Kalau dibandingkan dengan kondisi ideal, sarana prasarana yang kami miliki saat ini masih jauh dari kata cukup. Armada pengangkut terbatas, TPS sangat minim, dan peralatan pendukung lain seperti kontainer, gerobak, atau fasilitas pemilahan juga belum memadai. Dengan kondisi seperti ini, kami memang bisa menjalankan pelayanan di tingkat perkotaan, tetapi sulit berbicara tentang perluasan layanan ke kecamatan lain. Bahkan untuk mempertahankan kualitas layanan di dua kecamatan yang sudah terlayani pun kami harus mengatur strategi dengan sangat hati-hati.

- **Peneliti:**

Bagaimana cakupan pelayanan ke seluruh kecamatan?

- **Informan:**

Secara jujur, cakupan pelayanan kami baru menyentuh dua kecamatan, yaitu Petasia dan Lembo, yang merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Delapan kecamatan lainnya belum mendapatkan layanan pengangkutan sampah secara rutin dari pemerintah. Di wilayah tersebut, masyarakat praktis mengelola sampah sendiri-sendiri. Dari perspektif kebijakan publik, ini menunjukkan bahwa kecukupan layanan belum tercapai, dan tantangan kami ke depan adalah memperluas cakupan ini secara bertahap seiring dengan penambahan sarana dan anggaran.

- **Peneliti:**

Apakah jumlah tenaga lapangan sudah memadai?

- **Informan:**

Jumlah tenaga lapangan saat ini jelas belum memadai. Dengan luas wilayah dan sebaran permukiman seperti Morowali Utara, idealnya kami memiliki lebih banyak sopir, pengangkut sampah, penyapu jalan, serta petugas pengelola TPS dan TPA. Kenyataannya, satu petugas sering harus menangani area yang cukup luas, sehingga aspek pengawasan dan pemeliharaan kebersihan tidak bisa dilakukan secara intensif. Kondisi ini menyebabkan beban kerja tinggi, potensi kelelahan petugas meningkat, dan tentu saja memengaruhi konsistensi pelayanan di lapangan.

D. Dimensi Pemerataan

- **Peneliti:**

Bagaimana upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan pelayanan di daerah terpencil?

- **Informan:**

Pemerintah daerah pada prinsipnya menyadari pentingnya pemerataan layanan, termasuk di daerah-daerah terpencil. Upaya yang kami lakukan sejauh ini masih bersifat perencanaan dan pengusulan, misalnya mengajukan penambahan armada dan usulan pembangunan TPS di kecamatan lain melalui mekanisme perencanaan tahunan. Selain itu, kami pernah mencoba skema kerja bakti massal dan dukungan alat sederhana ke desa-desa, tetapi itu belum bisa disebut pemerataan layanan pengangkutan. Jadi, bisa dikatakan upaya ke arah pemerataan sudah ada dalam bentuk perencanaan dan program awal, tetapi belum terwujud dalam bentuk layanan rutin yang dirasakan masyarakat di daerah terpencil.

- **Peneliti:**

Apakah ada wilayah yang belum terjangkau layanan persampahan?

- **Informan:**

Ada, dan jumlahnya cukup banyak. Delapan kecamatan yang berada di luar jangkauan armada pengangkut saat ini praktis belum mendapat

layanan persampahan dari pemerintah. Mereka mengandalkan cara-cara tradisional seperti membakar sampah di pekarangan, membuang di kebun, atau di tepi lahan kosong. Dari sudut pandang keadilan pelayanan publik, ini tentu menjadi catatan penting karena masyarakat di wilayah tersebut belum memperoleh hak yang sama atas layanan kebersihan lingkungan.

- **Peneliti:**

Bagaimana strategi pemerataan sarana antar-kecamatan?

- **Informan:**

Secara teknis, strategi kami adalah memulai dari pembangunan TPS di titik-titik yang dianggap strategis, misalnya di kecamatan yang memiliki pusat permukiman padat. Setelah itu, barulah direncanakan penambahan armada yang ditempatkan secara permanen atau mobile untuk melayani beberapa kecamatan sekaligus. Kami juga mempertimbangkan skema kemitraan dengan desa atau pihak swasta untuk pengadaan sarana tertentu. Namun semua strategi ini sangat bergantung pada dukungan anggaran dan komitmen lintas sektor, termasuk DPRD dan pemerintah desa.

E. Dimensi Responsivitas

- **Peneliti:**

Bagaimana DLH menanggapi laporan atau pengaduan masyarakat terkait sampah?

- **Informan:**

Untuk wilayah yang sudah terlayani, setiap laporan masyarakat kami

upayakan ditangani secepat mungkin. Umumnya laporan masuk melalui camat, lurah, atau langsung via telepon dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp. Jika laporan menyangkut penumpukan sampah di TPS atau di pinggir jalan utama, kami langsung koordinasikan dengan koordinator lapangan untuk mengatur ritase tambahan atau percepatan pengangkutan. Biasanya, dalam waktu 24 sampai 48 jam, laporan sudah ditindaklanjuti. Namun, di wilayah yang memang belum terlayani armada, kami tidak bisa banyak berbuat selain memberikan imbauan dan mendorong kerja bakti lokal, karena secara sistem tidak ada layanan pengangkutan di sana.

- **Peneliti:**

Apakah kebijakan persampahan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial dan lingkungan?

- **Informan:**

Secara praktik, kami mencoba menyesuaikan kebijakan operasional dengan dinamika di lapangan. Misalnya, ketika ada peningkatan aktivitas ekonomi di pasar pada hari-hari tertentu, kami menambah frekuensi pengangkutan di area tersebut. Begitu juga saat musim hujan, kami lebih waspada terhadap potensi sampah menyumbat drainase dan mengatur jadwal pembersihan lebih sering. Namun, fleksibilitas ini tetap berada di dalam keterbatasan sarana. Jadi secara prinsip, kebijakan operasional cukup responsif, tetapi daya jangkauan dan skalanya masih terbatas.

- **Peneliti:**

Apakah masyarakat dilibatkan dalam evaluasi kebijakan?

- **Informan:**

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan secara formal memang belum terstruktur, misalnya dalam bentuk forum evaluasi rutin. Tetapi secara informal, kami sering menerima masukan dari tokoh masyarakat, RT/RW, maupun organisasi lokal ketika ada keluhan atau saran perbaikan. Masukan tersebut kami himpun dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian rute, penambahan tong sampah, atau pengaturan jadwal layanan. Ke depan, kami melihat perlunya mekanisme evaluasi yang lebih partisipatif, agar suara masyarakat dari berbagai kecamatan bisa terakomodasi secara lebih sistematis.

F. Dimensi Ketepatan

- **Peneliti:**

Apakah substansi Perda No. 5 Tahun 2016 masih relevan?

- **Informan:**

Secara garis besar, substansi perda masih relevan karena mengatur seluruh siklus pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, sampai pembuangan akhir. Namun dalam perjalanannya, kami melihat adanya kebutuhan untuk penyesuaian, terutama terkait peran desa, skema pembiayaan, dan model pengelolaan di wilayah nonperkotaan. Kondisi geografis dan perkembangan aktivitas ekonomi

beberapa tahun terakhir juga membuat beberapa pasal terasa kurang operasional di lapangan.

- **Peneliti:**

Apakah kebijakan saat ini sudah tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan sampah?

- **Informan:**

Untuk wilayah kota, saya bisa mengatakan kebijakan ini cukup tepat sasaran karena menjawab masalah penumpukan sampah di area publik. Namun, untuk wilayah pedesaan dan kecamatan yang tidak terlayani, kebijakan ini belum menyentuh akar masalah. Mereka butuh pendekatan yang berbeda, misalnya penguatan TPS desa, pengelolaan berbasis komunitas, dan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi setempat. Jadi, kebijakan yang sekarang berjalan masih cenderung “urban oriented” dan belum sepenuhnya tepat sasaran untuk konteks kabupaten yang wilayahnya luas dan beragam.

- **Peneliti:**

Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk peningkatan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan?

- **Informan:**

Pertama, perlu ada penambahan armada dan petugas agar cakupan layanan bisa diperluas secara bertahap. Kedua, pembangunan TPS dan fasilitas pengelolaan sederhana, baik di tingkat kecamatan maupun desa, harus menjadi prioritas, sehingga sampah tidak lagi dibakar atau dibuang sembarangan. Ketiga, perlu revisi atau penguatan perda yang

mengatur lebih jelas peran desa, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Keempat, program edukasi dan sosialisasi perlu diperluas dan dibuat lebih sistematis, misalnya melalui kurikulum sekolah dan kegiatan keagamaan. Kalau semua ini dilakukan secara konsisten, saya yakin efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah di Morowali Utara akan jauh lebih baik ke depan.

Informan : Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara

Lokasi : Café Tehehe

Tanggal : (27 Oktober 2025)

A. Dimensi Efektivitas

- **Peneliti:**

Bagaimana peran DPRD dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2016?

- **Informan:**

DPRD berperan sejak tahap penyusunan perda, mulai dari pembahasan naskah akademik, konsultasi publik, hingga pengesahan. Kami memastikan perda ini memang dibutuhkan dan relevan dengan kondisi daerah. Setelah perda diterbitkan, fungsi pengawasan kami berjalan melalui rapat-rapat kerja dengan DLH, kunjungan lapangan, serta evaluasi pada saat pembahasan LKPI. Namun, harus saya akui, pengawasan terhadap implementasi perda ini terkendala oleh minimnya data riil dari lapangan dan belum adanya sistem pemantauan yang terintegrasi di setiap kecamatan. Beberapa kali kami menemukan bahwa

capaian pelaksanaan perda masih belum seperti yang diharapkan, terutama di kecamatan yang jauh dari pusat kota.

- **Peneliti:**

Apakah kebijakan ini sudah efektif mengatasi persoalan sampah?

- **Informan:**

Efektivitasnya bersifat parsial. Di wilayah kota, perda ini berdampak nyata—tumpukan sampah berkurang, jadwal pengangkutan lebih teratur, dan masyarakat merasa ada peningkatan kebersihan. Tetapi jika bicara kabupaten secara keseluruhan, perda ini belum efektif karena pelayanan belum menjangkau delapan kecamatan lain. Masalah terbesar bukan pada substansi perda, melainkan keterbatasan sarana dan anggaran. Jadi implementasinya masih jauh dari harapan awal pembentukan kebijakan.

- **Peneliti:**

Apakah DPRD melakukan evaluasi berkala?

- **Informan:**

Ya, evaluasi dilakukan tiap tahun pada saat pembahasan APBD, LCJP, dan rapat komisi. Namun secara jujur, evaluasi kami lebih banyak bersifat administratif. Idealnya, kami melakukan evaluasi berbasis data lapangan, tetapi itu masih perlu diperkuat. Dalam beberapa kesempatan, kami menyampaikan rekomendasi formal ke DLH agar memperbaiki sistem pengelolaan armada, menambah petugas, serta menyusun indikator capaian yang lebih terukur.

B. Dimensi Efisiensi

- **Peneliti:**

Bagaimana DPRD menilai efisiensi alokasi APBD untuk pengelolaan sampah?

- **Informan:**

Dari sisi pengelolaan, DLH sudah sangat efisien karena bekerja dengan anggaran yang sangat terbatas. Tetapi dari sisi kebutuhan, anggarannya jauh dari mencukupi. Idealnya, sektor persampahan mendapatkan porsi lebih besar agar dapat mengimbangi pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi di daerah. Kami juga mencatat bahwa sebagian besar anggaran habis untuk operasional dasar, sehingga tidak ada ruang untuk pengembangan inovasi.

- **Peneliti:**

Apakah program yang dibiayai sudah memberikan hasil sesuai harapan?

- **Informan:**

Hasilnya baru terlihat di wilayah kota. Program seperti pengadaan tong portable, penataan ritase, dan pembersihan sungai berdampak signifikan. Namun di desa, program tidak berjalan karena tidak ada sarana. Jadi keberhasilan program belum merata. Kami mendorong agar DLH menyusun rencana jangka menengah dengan target pencapaian bertahap per kecamatan.

- **Peneliti:**

Apakah masih ada pemborosan atau tumpang tindih anggaran?

- **Informan:**

Kami tidak melihat pemborosan. Justru permasalahannya adalah

kekurangan anggaran. Namun tumpang tindih bisa terjadi jika tidak ada koordinasi antara DLH dan desa, misalnya terkait pembelian tong sampah atau kegiatan kebersihan rutin. Karena itu kami menyarankan adanya pedoman teknis penggunaan anggaran desa terkait lingkungan.

C. Dimensi Kecukupan

- **Peneliti:**

Apakah dukungan regulasi dan dana sudah cukup untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sampah?

- **Informan:**

Dari sisi regulasi, perda dan perbup sudah tersedia. Namun implementasinya tergantung dana, dan pada aspek ini jelas belum cukup. Sarana pengelolaan seperti TPS, armada, dan TPA memerlukan penguatan anggaran yang signifikan. Kami juga melihat perlu adanya peraturan tambahan yang mengatur peran pemerintah desa dalam pengendalian sampah.

- **Peneliti:**

Apakah DPRD merencanakan penguatan regulasi atau perda baru?

- **Informan:**

Ada wacana untuk melakukan revisi Perda No. 5 Tahun 2016 dengan menambahkan skema pengelolaan berbasis desa dan peningkatan peran lembaga masyarakat. Selain itu, DPRD mendorong adanya regulasi turunan berupa SOP teknis untuk memperjelas pembagian tanggung jawab antar-OPD.

- **Peneliti:**

Bagaimana keterlibatan DPRD dalam pengawasan penggunaan fasilitas?

- **Informan:**

Kami melakukan pengawasan melalui kunjungan lapangan, terutama pada saat menerima laporan keluhan masyarakat. DPRD juga memantau kondisi armada, TPS, dan TPA dalam pembahasan anggaran. Namun pengawasan kami akan lebih kuat jika dilengkapi laporan berkala dari kecamatan.

D. Dimensi Pemerataan

- **Peneliti:**

Apakah kebijakan ini telah menjamin pemerataan pelayanan?

- **Informan:**

Belum sama sekali. Layanan masih sangat terpusat di perkotaan. Secara politik anggaran, kami memahami keterbatasan DLH, tetapi masyarakat di kecamatan luar kota juga memiliki hak yang sama atas layanan dasar kebersihan.

- **Peneliti:**

Bagaimana pengawasan DPRD terhadap pelayanan ini?

- **Informan:**

Kami meminta DLH menyusun roadmap pemerataan layanan hingga 2027.

DPRD menekankan perluasan layanan menjadi prioritas, bukan hanya perbaikan layanan kota.

- **Peneliti:**

Apakah kelompok pinggiran sudah terlayani?

- **Informan:**

Belum. Banyak desa di luar kota yang masih mengelola sampah sendiri.

Ini salah satu alasan kami terus mendorong agar anggaran sektor persampahan dinaikkan.

E. Dimensi Responsivitas

- **Peneliti:**

Bagaimana DPRD menindaklanjuti keluhan masyarakat?

- **Informan:**

Keluhan kami tampung melalui reses, media sosial, dan pertemuan warga. Kami kemudian menyampaikan ke DLH melalui rapat komisi.

Biasanya DLH responsif, tetapi tergantung wilayah yang terjangkau armada.

- **Peneliti:**

Apakah kebijakan cukup responsif terhadap aspirasi warga?

- **Informan:**

Cukup responsif untuk kota, tetapi belum untuk desa. Aspirasi dari desa sering kali terkait pengadaan TPS dan armada, namun sulit ditindaklanjuti karena keterbatasan sumber daya.

- **Peneliti:**

Bagaimana komunikasi DPRD dan DLH?

- **Informan:**

Komunikasinya baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal pelaporan berkala, terutama terkait data lapangan.

F. Dimensi Ketepatan

- **Peneliti:**

Apakah kebijakan ini sudah tepat dalam konteks pembangunan berkelanjutan?

- **Informan:**

Konsepnya tepat karena mendorong pengurangan dan pengelolaan sampah. Tetapi implementasinya belum mencerminkan prinsip keberlanjutan karena masih bergantung pada pola kumpul-angkut-buang tanpa pengolahan.

- **Peneliti:**

Apakah ada rencana revisi atau inovasi ke depan?

- **Informan:**

Ada pembahasan awal terkait integrasi konsep 3R, pengelolaan berbasis desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga.

- **Peneliti:**

Strategi apa yang paling tepat untuk keberlanjutan kebijakan?

- **Informan:**

Memperkuat kapasitas DLH, menambah sarana, memperjelas peran desa, serta mendorong partisipasi pihak swasta.

Informan: Camat Petasia, Kabupaten Morowali Utara

Lokasi : Kantor Kecamatan Lembo

Tanggal : (27 Oktober 2025)

A. Dimensi Efektivitas

- **Peneliti:**

Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Anda?

- **Informan:**

Secara umum, pelaksanaan kebijakan berjalan cukup baik di wilayah kota kecamatan. Pengangkutan sudah lebih teratur dan kawasan pasar jauh lebih bersih dibanding dua tahun sebelumnya. Namun di desa-desa yang jauh dari pusat kecamatan, kebijakan ini hampir tidak terasa karena tidak ada layanan pengangkutan dari DLH.

- **Peneliti:**

Apakah layanan berjalan sesuai target?

- **Informan:**

Untuk area yang menjadi rute armada, iya—meskipun masih ada beberapa titik yang kadang terlewat ketika armada mengalami gangguan teknis. Namun secara keseluruhan, pelayanan sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

- **Peneliti:**

Bagaimana efektivitas koordinasi dengan DLH dan desa?

- **Informan:**

Koordinasi dengan DLH sangat baik. Laporan kami biasanya ditanggapi cepat. Dengan desa, koordinasi baik tetapi terbatas karena desa tidak punya sarana pendukung.

B. Dimensi Efisiensi

- **Peneliti:**

Apakah tenaga dan armada mencukupi?

- **Informan:**

Tidak. Dengan wilayah yang cukup luas, idealnya ada armada khusus yang ditempatkan di kecamatan kami, namun saat ini semua masih berpusat di Kolonodale.

- **Peneliti:**

Bagaimana tingkat efisiensi pengangkutan sampah?

- **Informan:**

Cukup efisien untuk wilayah kota. Tetapi untuk desa, efisiensinya rendah karena tidak ada sarana dasar.

- **Peneliti:**

Apakah ada kendala anggaran kecamatan?

- **Informan:**

Kami tidak punya anggaran operasional persampahan. Semua kewenangan ada di DLH.

C. Dimensi Kecukupan

- **Peneliti:**

Apakah fasilitas persampahan sudah memadai?

- **Informan:**

Untuk kota kecamatan, sudah lebih baik meski belum ideal. Di desa, fasilitas masih sangat minim bahkan tidak tersedia.

- **Peneliti:**

Apakah masyarakat terlayani secara menyeluruh?

- **Informan:**

Tidak. Hanya sekitar 20–30% warga yang merasakan pengangkutan reguler.

- **Peneliti:**

Apa langkah yang dilakukan jika pelayanan belum mencukupi?

- **Informan:**

Kami mendorong gotong royong dan pembuatan TPS darurat menggunakan bahan lokal.

D. Dimensi Pemerataan

- **Peneliti:**

Apakah seluruh desa mendapatkan layanan yang sama?

- **Informan:**

Tidak sama sekali. Desa jauh tidak terlayani.

- **Peneliti:**

Apakah ada wilayah prioritas atau yang tertinggal?

- **Informan:**

Wilayah prioritas hanya sekitar pusat kecamatan. Desa terpencil tertinggal.

- **Peneliti:**

Bagaimana upaya pemerataan?

- **Informan:**

Harus dimulai dengan menambah armada dan membangun TPS di

kecamatan.

E. Dimensi Responsivitas

- **Peneliti:**

Bagaimana respon kecamatan terhadap keluhan warga?

- **Informan:**

Kami selalu memfasilitasi dan meneruskan laporan ke DLH. Respons mereka cukup cepat.

- **Peneliti:**

Apakah masyarakat ikut serta?

- **Informan:**

Tidak semua. Ada desa yang aktif kerja bakti, ada juga yang masih rendah kesadarannya.

- **Peneliti:**

Strategi meningkatkan kesadaran?

- **Informan:**

Menggunakan pendekatan keagamaan, tokoh adat, dan sekolah.

F. Dimensi Ketepatan

- **Peneliti:**

Apakah kebijakan sesuai karakter wilayah?

- **Informan:**

Untuk wilayah padat penduduk, sesuai. Untuk desa terpencil, tidak sesuai.

- **Peneliti:**

Apakah ada inovasi lokal?

- **Informan:**

Ada kegiatan “Jumat Bersih”, tetapi belum rutin.

- **Peneliti:**

Rekomendasi?

- **Informan:**

Penambahan armada, TPS, edukasi berkelanjutan, dan pelibatan desa.

Informan: Camat Lembo, Kabupaten Morowali Utara

Lokasi : Kantor Kecamatan Lembo

Tanggal : (30 Oktober 2025)

- **Pembukaan**

Peneliti: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Lembo berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Jawaban Bapak akan menjadi bagian dari data penelitian ini dan dijamin kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia melanjutkan?

Informan (Camat Lembo) : Iya, saya bersedia.

- **Transkrip Wawancara Berdasarkan Dimensi Evaluasi**

Dimensi 1 — Efektivitas

Peneliti:

Menurut Bapak, sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Lembo telah berjalan sesuai tujuan dan menghasilkan perubahan nyata?

Camat Lembo:

Secara jujur saya bisa katakan bahwa kebijakan ini belum berjalan efektif di wilayah kami. Sampai saat ini, pelayanan pengangkutan sampah baru dilakukan di **satu desa saja, yaitu Desa Beteleme**, itu pun hanya terbatas pada area **sekitar pasar dan lapangan**. Jadi kalau dikatakan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan, jawabannya belum. Sebagian besar warga masih mengelola sampah sendiri dengan cara dibakar atau dibuang ke lahan kosong.

Dimensi 2 — Efisiensi

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak terkait ketersediaan sumber daya dan pemanfaatannya dalam layanan persampahan?

Camat Lembo :

Dari sisi efisiensi juga belum terpenuhi. Armada pengangkut sampah yang tersedia belum mencukupi untuk menjangkau seluruh desa di Kecamatan Lembo. Sumber daya manusia khusus untuk pengelolaan sampah juga belum ada, sehingga pelayanan sangat terbatas. Anggaran dari desa atau kecamatan juga belum dialokasikan khusus untuk kegiatan ini.

Dimensi 3 — Kecukupan (Adequacy)

Peneliti:

Apakah kebijakan yang ada sudah cukup menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah Bapak?

Camat Lembo :

Belum cukup. Kalau melihat kondisi sekarang, kebijakan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Meskipun sudah ada peraturan

daerah, implementasinya belum jalan karena sarana, prasarana, sumber daya, dan mekanisme layanan belum mendukung.

Dimensi 4 — Pemerataan (Equity)

Peneliti:

Bagaimana dengan pemerataan pelaksanaan layanan persampahan?

Camat Lembo:

Layanannya masih belum merata. Seperti yang saya sampaikan, hanya Desa Beteleme yang mendapatkan layanan, dan itu pun hanya pada titik tertentu. Desa-desa lain belum tersentuh pelayanan sama sekali.

Dimensi 5 — Responsivitas

Peneliti:

Bagaimana respon masyarakat terkait layanan persampahan di daerah Bapak?

Camat Lembo:

Sebenarnya respon masyarakat beragam. Ada yang berharap pelayanan ini bisa diperluas karena kesadaran akan kebersihan mulai meningkat. Tapi ada juga yang masih anggap biasa saja. Karena pelayanan belum maksimal, masyarakat juga belum melihat contoh yang ideal.

Dimensi 6 — Ketepatan (Appropriateness)

Peneliti:

Menurut Bapak, apakah kebijakan dan mekanisme implementasinya sudah tepat dengan kondisi daerah?

Camat Lembo :

Secara konsep, kebijakannya sudah tepat karena pengelolaan sampah

memang harus menjadi perhatian pemerintah. Tapi dari sisi pelaksanaan masih belum tepat karena belum ada dukungan fasilitas, pembiayaan, dan SDM. Jadi secara praktik, kebijakan ini belum menjawab realitas yang ada.

- **Penutup**

Peneliti:

Terima kasih Bapak atas informasi yang diberikan. Apakah ada tambahan yang ingin disampaikan?

Camat Lembo :

Intinya, kami berharap ada penguatan sarana, anggaran, dan dukungan teknis dari kabupaten agar kebijakan ini benar-benar dapat berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Peneliti:

Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya, Pak.

Informan: Masyarakat, Kabupaten Morowali Utara

Lokasi : Rumah Masyarakat

Tanggal : (29 Oktober 2025)

A. Dimensi Efektivitas

- **Peneliti:**

Apakah kondisi kebersihan di lingkungan Anda membaik?

- **Informan:**

Di wilayah kota, jelas membaik. Tapi di desa kami, tidak ada perubahan karena tidak ada layanan.

- **Peneliti:**

Apakah masyarakat mengetahui adanya Perda 5/2016?

- **Informan:**

Tidak banyak yang tahu. Hanya sebagian kecil warga kota yang mengetahuinya.

- **Peneliti:**

Bagaimana dampaknya ke kehidupan sehari-hari?

- **Informan:**

Yang terlayani merasa terbantu. Yang tidak terlayani tetap mengelola sampah sendiri.

B. Dimensi Efisiensi

- **Peneliti:**

Apakah petugas kebersihan bekerja rutin?

- **Informan:**

Di kota, ya. Di desa, tidak ada petugas.

- **Peneliti:**

Bagaimana kualitas pelayanan?

- **Informan:**

Baik untuk warga kota, tidak ada untuk warga desa.

- **Peneliti:**

Apakah Anda puas?

- **Informan:**

Warga kota puas. Warga desa merasa diabaikan.

C. Dimensi Kecukupan

- **Peneliti:**

Apakah TPS tersedia?

- **Informan:**

Tidak ada TPS di desa kami.

- **Peneliti:**

Apakah pengangkutan dilakukan teratur?

- **Informan:**

Tidak pernah ada pengangkutan di desa.

- **Peneliti:**

Kendala utama?

- **Informan:**

Tidak adanya sarana dan minimnya perhatian pemerintah.

D. Dimensi Pemerataan

- **Peneliti:**

Apakah layanan merata?

- **Informan:**

Tidak. Sangat tidak merata.

- **Peneliti:**

Apakah ada wilayah kurang diperhatikan?

- **Informan:**

Banyak desa jauh sangat kurang diperhatikan.

- **Peneliti:**

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap retribusi?

- **Informan:**

Warga kota setuju. Warga desa menolak jika tidak ada layanan.

E. Dimensi Responsivitas

- **Peneliti:**

Bagaimana pemerintah menanggapi keluhan?

- **Informan:**

Kalau di kota cepat. Di desa tidak ada tindak lanjut karena tidak ada layanan.

- **Peneliti:**

Apakah masyarakat dilibatkan dalam kegiatan kebersihan?

- **Informan:**

Kadang ikut kerja bakti, tetapi tidak ada pembinaan rutin.

- **Peneliti:**

Apa bentuk partisipasi masyarakat yang paling efektif?

- **Informan:**

Kerja bakti dan gotong royong.

F. Dimensi Ketepatan

- **Peneliti:**

Apakah kebijakan sesuai kondisi masyarakat?

- **Informan:**

Belum sesuai. Masyarakat desa butuh pendekatan berbeda.

- **Peneliti:**

Apa langkah terbaik menurut Anda?

- **Informan:**

Bangun TPS, tambah armada, lakukan edukasi rutin.

- **Peneliti:**

Apa harapan Anda kepada pemerintah?

- **Informan:**

Layanan merata dan fasilitas yang lebih baik untuk semua kecamatan.

Lampiran III

DOKUMENTASI PENELITIAN



Informaan Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup




Wawancara dengan Anggota DPRD Morowali Utara



Wawancara Dengan Masyarakat

Lampiran IV

Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: fisip@untad.ac.id Laman: <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : 4794/UN28.3/DT.00.00/2025
Perihal : Izin Penelitian

Palu, 2 September 2025

Yth. Camat Lembo

Di-
Tempat


Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Herry Yohanes Pinontoan
Stambuk	: B10224061
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Judul Tesis	: Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di kabupaten Morowali Utara

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari Kantor/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin, sesuai Judul Tesis mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.Si.
NIP. 196810211992031001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Tadulako;
2. Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Univ. Tadulako;
3. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: fisip@untad.ac.id Laman: <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : 4794/UN28.3/DT.00.00/2025
Perihal : Izin Penelitian

Palu, 2 September 2025

Yth. Camat Petasia

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Herry Yohanes Pinontoan
Stambuk : B10224061
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di
kabupaten Morowali Utara

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari Kantor/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin, sesuai Judul Tesis mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.Si.
NIP. 196810211992031001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Tadulako;
2. Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Univ. Tadulako;
3. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: fisip@untad.ac.id Laman: <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : 4794/UN28.3/DT.00.00/2025
Perihal : Izin Penelitian

Palu, 2 September 2025

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Morowali Utara
Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Herry Yohanes Pinontoan
Stambuk : B10224061
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di
kabupaten Morowali Utara

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari Kantor/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin, sesuai Judul Tesis mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.St.
NIP. 196810211992031001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Tadulako;
2. Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Univ. Tadulako;
3. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: fisip@untad.ac.id Laman: <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : 4794/UN28.3/DT.00.00/2025
Perihal : Izin Penelitian

Palu, 2 September 2025

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Herry Yohanes Pinontoan
Stambuk : B10224061
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di kabupaten Morowali Utara

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari Kantor/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin, sesuai Judul Tesis mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.Si.
NIP.196810211992031001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Tadulako;
2. Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Univ. Tadulako;
3. Arsip.

Lampiran V

Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KECAMATAN LEMBO**

Jln. Trans Sulawesi No. 563. Beteleme, Kec. Lembo, Kode Pos 94966

Beteleme, 10 November 2025

Nomor : 000.9/541/CL/XI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako (UNTAD)
di
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor :4794/UN28.3/DT.00.00/2025, perihal Permohonan Izin
Penelitian atas nama :

Nama : HERRY YOHANES PINONTOAN
Stambuk : B10224061
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan
Sampah di Kabupaten Morowali Utara

Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan
Penelitian serta pengambilan data dan informasi terkait Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Morowali Utara secara khusus pada
Kecamatan Lembo.

Demikian disampaikan atasnya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
CAWAT LEMBO

BENYAMIN PB HAMBUAKO, S.Sos
Pembinas Tk.II, IV/b
NIP 197103282003121004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Jln. Poros Ganda-Ganda Kolonodale no....., Kode Pos 94971

Kolonodale, 10 November 2025

Nomor : 000/83/DLHD/XI/2025
Lampiran : -
Hal : Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako (UNTAD)
Di -
Palu

Berdasarkan Surat No : 4794/UN28.3/DT.00.00/2025, Perihal Permohonan
Izin Penelitian atas nama :

- Nama : HERRY YOHANES PINONTOAN
- Stambuk : B10224061
- Program Studi : Megister Administrasi Publik
- Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara

Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Penelitian serta pengambilan data dan informasi terkait Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Demikian disampaikan atasnya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPILA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Ir. Syarifudin, ST., MT
PEMBINA Tk. I, IV/b
NIP 1973101620000031003





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Kuda Laut, Petasia, Kolonodale, Morowali Utara, Sulawesi Tengah (94971)
Pos-el: Setdprmorut@gmail.com

Kolonodale, 11 November 2025

Nomor : 000/58/Set-DPRD/XI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : ***Ijin Melaksanakan Penelitian***

Yth. Kepada
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako (UNTAD)

Di -
Palu.

Berdasarkan Surat No:4794/UN28.3/DT.00.00/2025, Perihal Permohonan Izin
Penelitian atas nama :

Nama : HERRY YOHANES PINONTOAN
Stambuk : B10224061
Program Studi : Megister Administrasi Publik
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Morowali Utara

Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah
melakukan Penelitian serta pengambilan data dan informasi terkait Evaluasi
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali
Utara secara khusus pada Sekretariat DPRD

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Disandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAB. MOROWALI UTARA,

HELTAN RANSA, S.H.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 196806021995031003





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KECAMATAN PETASIA

Jalan Bumi Nangka No. 01 Kolonodale Telp. (0465) 21375 Kode Pos 94671

Kolonodale, 11 November 2025

Nomor : 074/0093/PTS/XI/2025
Lampiran : -
Hal : Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako (UNTAD)

Di
Palu

Berdasarkan Surat No: 4794/UN28.3/DT.00.00/2025, Perihal Permohonan

Izin Penelitian atas nama :

- Nama : HERRY YOHANES PINONTOAN
- Stambuk : B10224081
- Program Studi : Magister Administrasi Publik
- Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara

Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Penelitian serta pengambilan data dan informasi terkait Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara secara khusus pada Kecamatan Petasia.

Demikian disampaikan atasnya diucapkan terima kasih.

